

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI ONLINE BERBASIS ANDROID
(STUDI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJALENGKA)****Rizka Sondari¹, Deni Herdiana²**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Majalengka**ABSTRAK**

Absensi menjadi faktor penting dalam sebuah aspek penilaian di suatu instansi. Proses absensi yang masih manual pada umumnya tidak efisien. Aplikasi PNS Majalengka pada *smartphone* dapat digunakan sebagai sistem informasi untuk menunjang implementasi kebijakan absensi online berbasis android, dikarenakan *smartphone* sudah menjadi kebutuhan sekunder untuk setiap orang dari berbagai kalangan usia karena fungsinya yang jauh lebih praktis dan efisien. Absensi pegawai juga akan membantu berkembang atau tidaknya instansi terutama dari sisi kedisiplinan dan tanggung jawab para pegawai guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan memiliki integritas. Sistem kehadiran akan sulit untuk diukur jika masih menggunakan sistem absensi secara manual. Sehingga, teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sudah berkembang pesat mendorong sistem absensi dilakukan dengan menggunakan *smartphone*. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data sebagai bahan kajian secara ilmiah serta memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui Teori implementasi menurut George Edward III, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan melibatkan 7 orang yang dijadikan sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absensi online berbasis android dapat meningkatkan kedisiplinan serta tanggung jawab Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

Kata Kunci: Absensi, ASN, Berbasis Android

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Aparatur Negara merupakan unsur penting dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aparatur Negara juga sebagai “mesin“

birokrasi yang menggerakkan sumberdaya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan. Disisi lain, Aparatur Negara menjadi pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan



masyarakat, sebagaimana dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia.

Menyadari peranan Aparatur Negara yang sangat strategis, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat perubahan yang cukup radikal dibandingkan dengan Peraturan Kepegawaian sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) pada pokoknya ditujukan untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan-perubahan di atas juga dimaksudkan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian reformasi birokrasi, serta menjawab tuntutan di lingkup Nasional dan tantangan yang bersifat global.

Birokrasi merupakan suatu organisasi memiliki rantai komando yang berbentuk piramida, dimana lebih banyak orang yang berada di

tingkat bawah daripada tingkat atas. Sistem organisasi ini biasa ditemui pada instansi yang bersifat administratif maupun militer. Organisasi yang menerapkan sistem birokrasi, biasanya memiliki prosedur dan aturan yang ketat. Hal ini berdampak dalam proses operasionalnya yang cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien. Meskipun muncul anggapan yang menyebutkan bahwa birokrasi identik dengan inefisiensi, pemborosan, dan kemalasan, namun pada faktanya sistem birokrasi masih diperlukan agar proses operasional berjalan sesuai dengan aturan. Begitupun dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan (BAPPEDALITBANG) merupakan lembaga daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan yang menerapkan sistem birokrasi.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bab I mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi pasal 2 ayat (2) menyampaikan bahwa BAPPEDA tingkat II adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Dan pada pasal 3 ayat (2) dikemukakan bahwa BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II dalam membentuk kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah



tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Majalengka, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. dan mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan penelitian dan pengembangan, melaksanakan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan penelitian dan pengembangan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang.

Absensi merupakan data kehadiran maupun ketidakhadiran dari suatu objek orang atau pegawai, dimana orang tersebut tercatat dalam suatu instansi yang mengharuskan adanya pemberitahuan tentang keadaannya baik berupa kehadiran maupun ketidakhadirannya dalam ruang lingkup instansi tersebut.

Perkembangan teknologi yang canggih tentu semakin menuntut kita untuk melakukan berbagai aktivitas menggunakan teknologi yang semakin sini semakin berkembang. Dunia seakan menjadi sempit dengan adanya teknologi, tidak ada yang mampu disembunyikan pada era modern di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, hampir semua kehidupan manusia telah menggunakan kecanggihan

teknologi informasi, baik pada tingkat individual, kelompok, semua jenis organisasi, pada tingkat Negara, dan bahkan hubungan antar organisasi maupun antar Negara. Seperti halnya berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Bab I Ketentuan Umum Bagian Kesatu Pengertian, Pasal 1 ayat (12) yang berbunyi bahwa absensi online adalah aplikasi berbasis android yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja dan aktifitas kerja bagi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat diakses secara online sehingga dapat menyajikan informasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Smartphone merupakan suatu alat komunikasi sekaligus media informasi digital yang semakin luas peruntukannya dan dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Adanya *smartphone* saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang melekat pada diri manusia dalam berbagai usia, yang mana hampir seluruh usia tidak terlepas dari yang namanya teknologi terutama dengan adanya *smartphone* dan jaringan internet yang semakin meluas dan bisa diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan dimana pun selama masih ada jaringan internet. Semakin berkembangnya teknologi pada saat ini dan sistem pemerintahan yang kian kompleks, maka menimbulkan terjadinya



perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang dahulu bersifat manual kini menjadi elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Elektronik. Peraturan Presiden ini dibuat untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel yang berbasis elektronik. Sehingga saat ini setiap instansi diharuskan menggunakan sistem pengolahan data elektronik yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Pemerintahan yang baik yaitu, pemerintahan yang mampu mengikuti era perkembangan zaman.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh suatu instansi tentu akan membantu instansi tersebut dalam menangani suatu informasi dalam jumlah besar, informasi mengenai sumber daya manusia dibutuhkan oleh instansi untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Sehingga, dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam instansi tersebut.

Saat ini *smartphone* tersedia sebagai alat komunikasi yang sudah memiliki keunggulan yang cukup banyak dari fungsi dasarnya, sudah tersedia berbagai macam fungsi pendukung yang telah ditanamkan pada perangkat ini, seperti dengan adanya pengolah gambar dan video, pengolah dokumen, *global positioning system*, dan lain sebagainya.

Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan data

pegawai saat ini dianggap sangat penting karena akan mendukung terciptanya *good governance*. Karena, dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan semakin meningkat mampu mengarahkan kita pada proses pengolahan data secara elektronik, adanya sistem *online* dengan berbasis *android* mampu meminimalisir terjadinya suatu kesalahan seperti halnya kesalahan yang terjadi pada sistem manual.

Sistem absensi pegawai seringkali digunakan untuk memastikan sejauhmana tanggung jawab dari para pegawai terhadap pekerjaannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan hal ini, kehadiran pegawai dapat diukur dengan mudah. Salah satu sistem yang kini sering digunakan adalah aplikasi absensi online berbasis android. Sistem Absensi android ini dibuat supaya mengelola absensi PNS / CPNS pada suatu instansi dalam bentuk digital / online dan sudah terintegrasi dengan server pusat. Dengan di berlakukannya Absen Online berbasis sistem Android ini dapat mengurangi kemungkinan kecurangan, yaitu dimana Informasi yang diperoleh melalui sistem absensi akan diolah secara *realtime*. Hasilnya akan sama dengan informasi yang dihasilkan mesin absensi dikantor (dilengkapi *GPS*). Hal ini tentunya dapat mengurangi kemungkinan manipulasi terhadap data absen.

Aplikasi absensi online berbasis android saat ini mulai digunakan oleh instansi, karena



kehadiran pegawai sulit diukur jika sistem absensi yang digunakan masih menggunakan sistem absensi manual. Serta untuk mendukung terciptanya *good governance* maka dalam pengelolaan data pegawai diperlukan adanya implementasi sistem teknologi dan informasi. Dampak terhadap instansi yang menggunakan sistem teknologi dan informasi dalam pengelolaan data pegawai secara elektronik yaitu tersedianya informasi yang aktual dan akurat sehingga pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, manfaat implementasi sistem teknologi dan informasi dalam pengelolaan data pegawai yaitu meningkatnya disiplin kerja pegawai terkait dengan tugas pengolahan, pengelolaan, penyaluran

dan pendistribusian informasi.

Sistem absensi online berbasis android dipilih, karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan sistem absensi yang bersifat manual atau *finger print*. Sistem ini sangat efektif dan efisien karena dapat langsung diakses menggunakan internet sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, biaya dan sumberdaya manusia yang menjalankannya hanya perlu melihat pada data laporan melalui *software* Absensi Online yang digunakan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1. Data Absensi Online Berbasis Android Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Absensi Online Berbasis Android Tahun 2020

NO	NA MA NIP JAB ATA N	AKUMU LASI ABSE NSI	KONV ERSI DALA M HARI	KETERANG AN ABSENSI				
				D L	C	S	I T K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Drs. H. YAYAN SUMANTRI, M.Si. 19670724 198603 1 002 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	03 jam 35 menit	0 hari	5	0	0	0	0
2	WAWAN SARWANTO, S.T., M.H. 19800514 200501 1 010 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	03 jam 00 menit	0 hari	5	0	0	0	0
3	YANNE HILLA GARTIKA, S.T. 19710601 200801 2 001 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	03 jam 00 menit	0 hari	5	0	0	0	0



Volume XIV No. 2 Juli-Desember 2021

4	NOVEMIA PREKONIMA, S.E. 19811124 201101 2 002 Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat	03 jam 21 menit	0 hari	4	0	0	0	0
5	KARTIKA DEWI, S.Pt 19860407 201001 2 017 Bendahara	03 jam 21 menit	0 hari	8	0	0	0	0
6	KANTI 19650216 198809 2 001 Verifikator Data Laporan Keuangan	03 jam 49 menit	0 hari	4	0	0	2	0
7	ABDUL MUHIT 19680525 199003 1 002 Penata Laporan Keuangan	37 jam 43 menit	5 hari	1 0	0	0	0	4
8	DONI RAMDAN 19790808 201212 1 001 Pengelola Barang Milik Negara	08 jam 38 menit	0 hari	4	0	2	0	1
9	ROSMAYANTI, S.Hut. 19771206 201406 2 002 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat	06 jam 02 menit	0 hari	1 1	0	0	4	2
10	EVA ROSYANI 19711104 200801 2 002 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	03 jam 07 menit	0 hari	4	0	0	1	1
11	WAHYU KOSASIH, S.T. 19730131 200501 1 006 Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	03 jam 66 menit	0 hari	1 5	0	2	0	1
12	ANDIK HENDRO HARYONO, S.IP. M.T 19770519 201001 1 006 Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	14 jam 10 menit	2 hari	5	0	3	0	1
13	DIAN SUPRIYANTO, S.Hut.T., M.Si. 19740815 199301 1 001 Analisis Rencana Program dan Kegiatan	06 jam 28 menit	0 hari	4	0	1	0	1
14	DINNIE SUMARTINI, S.Si. 19830312 201001 2 008 Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	05 jam 60 menit	0 hari	5	0	1	0	0



Volume XIV No. 2 Juli-Desember 2021

15	ZAKY JATNIKA, S.Si. 19880606 201502 1 001 Analisis Rencana Program dan Kegiatan	14 jam 07 menit	2 hari	4	0	1	0	1
16	M. ALI SOLIHIN, S.Hut., M.M 19701002 200701 1 020 Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	03 jam 15 menit	0 hari	5	0	2	0	0
17	DEDE HAKIMUROSAD, SP.,M.Si. 19711218 200003 1 002 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	03 jam 00 menit	0 hari	4	0	2	0	1
18	PRATIWI SURYANI, S.Hut 19750123 200003 2 004 Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	03 jam 00 menit	0 hari	4	0	2	0	1
19	ENUNG SUMINAR 19841012 201212 2 001 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	04 jam 00 menit	0 hari	6	0	1	0	1
20	NUNIK RACHMAWATI, S.TP., M.Si. 19770324 200501 2 007 Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	03 jam 07 menit	0 hari	4	0	1	0	1
21	CUCU YULIANA NUGRAHA 19830715 201406 1 003 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	04 jam 31 menit	0 hari	4	0	3	0	1
22	SRI EKAWATI, A.Md,Keb.,S.ST.MM 19780407 201001 2 011 Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	04 jam 06 menit	0 hari	4	0	1	0	1
23	DADANG SANDY BAHRUDIN, S.Sos., M.Si.	06 jam 02 menit	0 hari	4	0	1	0	1



Volume XIV No. 2 Juli-Desember 2021

	19730317 199703 1 005 Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam							
24	AANG SUSANTO, S.P., M.M. 19691010 199603 1 010 Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	03 jam 07 menit	0 hari	4	0	0	0	1
25	SOLEHUDIN 19641219 200701 1 002 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	15 jam 07 menit	2 hari	3	0	0	0	1
26	JAJANG JAENUDIN, S.Pt. 19781124 200604 1 011 Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	01 jam 42 menit	0 hari	4	0	0	0	1
27	MOVANI RAFSANZANI, SE 19920518 201502 2 001 Analisis Rencana Program dan Kegiatan	04 jam 17 menit	0 hari	4	0	0	0	1
28	ALVITA HANDAYANI, S.T. 19770129 201101 2 001 Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	06 jam 44 menit	0 hari	5	0	1	0	1
29	LIES YUSNITA PUSPITASARI, S.Pt. 19801212 201406 2 003 Analisis Rencana Program dan Kegiatan	02 jam 35 menit	0 hari	4	0	1	0	3
30	VERA JUNTRIESTA VARDHANI, S.T., M.T. 19720611 200501 2 002 Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	04 jam 45 menit	0 hari	5	0	0	0	1
31	ANDI EKA SISWANTO, S.T. 19780612 200604 1 009 Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	03 jam 21 menit	0 hari	4	0	0	0	1
32	MIKLAS FAJRIN NURCAHYO, S.STP 19940616 201708 1 001	03 jam 09 menit	0 hari	11	0	0	0	1



Volume XIV No. 2 Juli-Desember 2021

	Analisis Rencana Program dan Kegiatan								
33	RIKI RIKSAWANDA, S.S. 19781130 200501 1 003 Kepala Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	04 jam 38 menit	0 hari	6	0	1	0	1	
34	DEDEN SUDARMAN, S.Mn. 19800406 201001 1 001 Analisis Rencana Program dan Kegiatan	03 jam 10 menit	0 hari	4	0	0	0	1	
35	ASEP MULYANA, S.P. 19790416 200901 1 006 Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	03 jam 00 menit	0 hari	4	0	0	0	1	
36	HIMAWAN GAUTAMA 19780618 201408 1 001 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	03 jam 18 menit	0 hari	5	0	0	0	1	
37	YAYAT SUDRAJAT, S.IP., M.M. 19731019 199901 1 001 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	03 jam 01 menit	0 hari	13	0	1	0	0	
38	ANGGA NUGRAHA, S.Sos., M.Si. 19790609 200901 1 005 Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	03 jam 01 menit	0 hari	4	0	2	0	1	
39	Drs. R. SUMARWOTO SOEPARDJO 19650210 200901 1 002 Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Bidang Penelitian dan Pengembangan	03 jam 03 menit	0 hari	5	0	3	0	0	
40	SUPARNA 19661009 198612 1 001 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	03 jam 32 menit	0 hari	5	0	3	0	0	
41	Hj. WIWIN SUWIAH, S.Sos 19660316 199003 2 001 Arsiparis Muda	03 jam 00 menit	0 hari	2	0	0	0	0	



42	NURUL LAELIA, SE 19860325 201903 2 004 Perencana Ahli Pertama	03 jam 54 menit	0 hari	4	0	1	0	0
43	FATRIA TEGUH NUGRAHA KUSPANDI, SE 19910306 201903 1 004 Perencana Ahli Pertama	03 jam 38 menit	0 hari	4	0	1	0	0
44	DANI NUGRAHA, S.E. 19911003 201903 1 002 Perencana Ahli Pertama	03 jam 00 menit	0 hari	4	0	1	0	0

Sumber: Admin OPD BAPPEDALITBANG

Absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka masih memiliki permasalahan-permasalahan yang menghambat seperti masih adanya keterangan tidak berada pada lokasi absen saat pegawai hendak melakukan absensi, masih terjadi adanya server sibuk saat hendak melakukan absensi, terindikasi adanya beberapa pegawai yang melakukan absensi online berbasis android belum tepat waktu, belum adanya ketegasan dari sistem proteksi absensi online berbasis android sehingga menyebabkan data yang dihasilkan dari absensi online berbasis android masih bisa dimanipulasi, dengan adanya permasalahan tersebut jika terus-menerus dibiarkan terjadi begitu saja maka perlahan akan mengakibatkan kinerja pegawai menjadi menurun serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sedikit terhambat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk

mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan hasilnya ke dalam bentuk penelitian dengan judul **“Implementasi kebijakan absensi online berbasis android (Studi Kasus Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Majalengka)”**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan penjajagan yang penulis lakukan terindikasi masih adanya masalah implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Masih adanya keterangan tidak berada pada lokasi absen saat pegawai hendak melakukan absensi.
2. Masih terjadi adanya server sibuk saat hendak melakukan absensi.
3. Terindikasi adanya beberapa ASN yang melakukan absensi



online berbasis *android* belum tepat waktu.

4. Belum adanya ketegasan dari sistem proteksi absensi online berbasis *android* sehingga menyebabkan data yang dihasilkan dari absensi online berbasis *android* masih bisa dimanipulasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah untuk memudahkan dalam penelitian dan pembahasan yang dilakukan, yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan absensi online berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka”.

Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan bagaimana implementasi kebijakan absensi online berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sebagai bahan untuk mengkaji secara ilmiah serta memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

Kajian Pustaka

Konsep Implementasi Kebijakan Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Pada dasarnya pengertian implementasi kebijakan bukan hanya terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin birokrasi, melainkan pada masalah aspek perwujudan kebijakan serta dalam kondisi bagaimana kebijakan tersebut dibuat, siapa yang membuat, akibat dari kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut setelah diimplementasikan. Menurut Sabatier yang dikutip oleh Wahab dalam bukunya yang berjudul “*Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*” menyampaikan makna implementasi adalah :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada



masyarakat atau kejadian-kejadian. (2016:135).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dari sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi, implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut J.Salusu dalam Yunus dan Kosmajadi (2014:105) menyampaikan bahwa implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Dapat juga dikatakan sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang akan dilaksanakan.

Implementasi Kebijakan

Studi implementasi kebijakan sangat penting untuk studi administrasi publik dan kebijakan publik. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya untuk melaksanakan atau mengimplementasikan. Tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengerti mengacu

pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan *Standard Operating Procedures*, maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Wahab (2016:143) dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik” menyampaikan bahwa implementasi kebijakan dapat pula dianggap sebagai suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*output*). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh wahab maka dapat kita simpulkan bahwa implementasi dapat dianggap sebagai suatu proses, keluaran dan hasil akhir karena pada dasarnya implementasi kebijakan tersebut



diawali dengan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh publik yang kemudian muncul suatu kebijakan yang memiliki tujuan yang hendak dicapainya, serta bagaimana hasil akhir dari kebijakan tersebut apakah berjalan sesuai dengan harapan dengan optimal atau tidak.

Menurut Awang yang dikutip oleh Supriyono dalam bukunya yang berjudul *“Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro”* menyampaikan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap di antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran mulai dari perencanaan sampai evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada orang yang terkena kebijakan (2018:85). Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekadar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dan keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai faktor, baik supra struktur

maupun infrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam tatanan implementasi kebijakan.

Nugroho dalam Yunus dan kosmajadi (2014:107) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah implementasi kebijakan merupakan suatu cara dari bagaimana kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat tercapai dengan optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Van Meter Van Horn dalam bukunya Syahrudin yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi kasus”* menyampaikan bahwa:

“Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya” (2018:29).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas bahwa untuk melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tindakan dari berbagai pihak terkait dalam pembuatan kebijakan agar kebijakan mudah dilaksanakan dan tujuan dapat tercapai sesuai harapan.

Menurut George Edwards III implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa



baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

Berdasarkan definisi tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi publik. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan publik apalagi sampai merugikan.

Menurut George Edward III dalam bukunya Kadji (2015:63) terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain, yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Sikap Pelaksana, (4) Struktur Birokrasi.

1) **Komunikasi**

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, yang dimana informasi tersebut adalah informasi mengenai kebijakan publik yang perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan serta lakukan

untuk menjalankan suatu kebijakan itu sendiri, sehingga apa yang menjadi suatu tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut George Edward III menyampaikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut tentu harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan yang disampaikan tidak jelas maupun tidak terspesifikasikan oleh pembuat kebijakan tersebut, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Yang dimana nantinya justru akan terjadi kebingungan jika tidak dijelaskan atau tidak dikomunikasikan terlebih dahulu secara mendetail, sehingga dengan kondisi tersebut akan memberikan peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pembuat kebijakan.

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards III, komunikasi sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

2) Sumber Daya

Sumber daya tentu mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya disini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumberdaya peralatan, serta sumber daya kewenangan yang dimana kewenangan disini untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Sebab seberapa jelas, akurat, dan konsistennya perintah implementasi kebijakan tersebut, namun jika orang-orang yang bertanggungjawab pada implementasi kebijakan itu kekurangan sumber daya yang mampu untuk melaksanakan hal tersebut seperti tidak memiliki kemampuan atau keinginan dari diri sendirinya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sarana dan prasarana kurang mendukung, maka implementasi kebijakan tersebut tentu tidak akan berjalan

secara efektif karena dengan sumber daya yang tidak mumpuni menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak akan tercapai sesuai dengan harapan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasaran menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan.

3) Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana disini dapat diartikan sebagai kemauan, kemampuan, keinginan serta kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang telah menjadi tujuan dari implementasi kebijakan tersebut dapat diwujudkan.

Jika suatu implementasi ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijak tersebut tetapi, mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan



tersebut karena hal yang paling utama itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai implementor kebijakan untuk mentaati dengan sungguh-sungguh kebijakan tersebut, dan jika sikap pelaksanaannya baik maka tujuan kebijakan itu dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mendukung sikap pelaksana dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan.

4) Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan cara melakukan koordinasi dengan baik. Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk

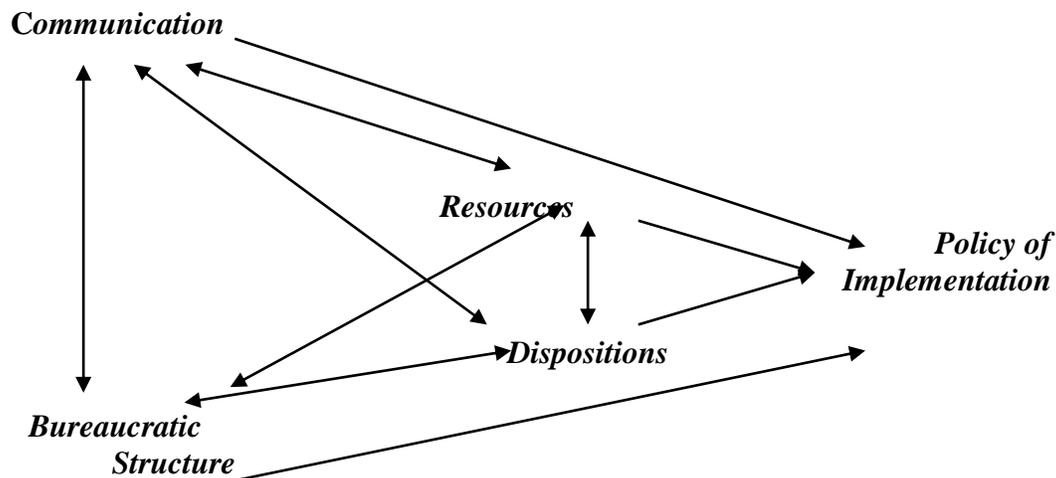
melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat diimplementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. dua karakteristik utama birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *fragmentasi*.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakam. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai kemauan dari diri sendirinya untuk melakukannya, namun suatu implemetasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Tetapi, standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, pembaharuan sebab mereka perlu beradaptasi kembali, akibat proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah inilah yang menjadikan terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai faktor-faktor struktur birokrasi yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam

melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.



Sumber: implementasi kebijakan George Edward III

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan setelah kebijakan itu dibuat, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan itu yang sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan itu sendiri untuk mencapai tujuan.

Absensi online berbasis android

Sistem absensi adalah *software* berbasis android yang dibuat untuk mengelola data absensi ASN pada suatu instansi dalam bentuk digital (*online*) yang sudah terintegrasi dengan server pusat.

Menurut Subiantoro dan Sardiarinto dalam jurnal (2021) yang

berjudul "*Penerapan Sistem Absensi online berbasis android (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Jawa Barat)*" menyampaikan bahwa absensi pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah instansi, dimana ketepatan waktu dan integritas pegawai dinilai akan membantu berkembang atau tidaknya suatu instansi tersebut. Sistem absensi disini seringkali digunakan guna memastikan komitmen dan tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui hal tersebut, kehadiran pegawai dapat diukur dengan mudah. Salah satu



sistem yang kini sering digunakan adalah aplikasi absensi online berbasis android.

Absensi online adalah aplikasi absensi berbasis android yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja dan aktivitas kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat diakses secara online, sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam bidang kepegawaian.

Husain dalam jurnal Safuan (2021) yang berjudul "*Penerapan Sistem Absensi online berbasis android (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Jawa Barat)*" menyampaikan bahwa sistem absensi yang mempunyai *software* yang *up to date* sangatlah penting, karena memiliki manfaat yang positif bagi instansi, terutama jika dilihat dari sisi efektif, efisiensi dan kecepatan. Sistem teknologi yang sekarang dipakai oleh instansi adalah *smartphone* android.

Sistem absensi online berbasis android dipilih, karena dianggap lebih efektif di banding absensi manual atau *finger print*. Sistem ini sangat efektif dan efisien karena dapat langsung diakses menggunakan internet kapan saja, dimana saja, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, kertas, dan sumberdaya manusia yang menjalankan hanya perlu melihat data laporan melalui *software* absensi online berbasis android tersebut.

Aplikasi sistem absensi online PNS dengan menggunakan android adalah aplikasi absen *online* yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dengan tujuan meningkatkan kinerja pegawai dilihat dari sisi efektif, efisien, dan kecepatan, sehingga Sumber Daya Manusia tersebut akan menjadi faktor penunjang bagi kemajuan suatu daerah.

Yang dimana dengan adanya implementasi kebijakan absensi online berbasis android disini langsung terkoneksi ke server pusat yang berada di BKPSDM, dan apabila tidak melakukan absensi atau terlambat melakukan absensi itu tentu akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja yang didapat serta akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang diperoleh.

Kelebihan Absensi online berbasis android

Selain karena banyaknya jumlah pengguna android maka berikut ini adalah beberapa kelebihan lainnya dari absensi online berbasis android :

1. Lebih Efisien dari Segi Biaya

Aplikasi absensi online berbasis android itu tidak membutuhkan perangkat fisik mesin absensi dan juga pemasangan sistem, sehingga akan bisa lebih menghemat biaya. Dengan absensi online berbasis android ini maka pihak perusahaan cukup mendaftar saja, lalu mengunduh



aplikasinya, dan kemudian sudah bisa menggunakannya langsung mencobanya lewat *smartphone* berbasis OS (*operation system*), android yang telah banyak sekali penggunaannya. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga bisa melaporkan kehadirannya secara langsung melalui telepon genggam *smartphone* mereka masing-masing yang sudah terpasang aplikasinya.

2. Hemat dan murah

Dengan absensi online berbasis android maka ASN yang bekerja di luar kantor juga bisa lebih menghemat banyak waktu, karena tanpa perlu datang ke kantor hanya untuk absen lalu kembali lagi ke tempat lokasi bertugas. Daripada membuang waktu di jalan hanya untuk melakukan absensi maka ASN dapat lebih produktif dengan fokus di lokasi tempat mereka bekerja dan bisa mencatatkan kehadirannya lewat aplikasi android di tempat dengan melakukan absensi kegiatan.

3. Dapat Meminimalisir Kecurangan

Absensi online berbasis android dengan menggunakan teknologi *Global Positioning System (GPS)* dapat memverifikasi kehadiran ASN pada suatu instansi, maka data kehadiran ASN yang tersimpan di

sistem, serta juga posisi pengguna aplikasi akan memberikan informasi mengenai keberadaannya secara *realtime* saat itu juga yang dapat terlacak oleh *GPS*.

Dengan absensi online berbasis android tersebut maka ASN atau siapa pun tidak mungkin bisa melakukan manipulasi ataupun mengubah data absensi, karena data *digital* tersebut telah dienkripsi dan juga tersimpan aman pada server penyedia aplikasi.

4. Memudahkan Analisa Data Kehadiran Pegawai

Aplikasi absensi online berbasis android tersebut akan memberikan informasi mengenai kehadiran ASN secara *realtime*. Sambil meeting di kantor atau mengerjakan pekerjaan lain sudah bisa mengetahui secara langsung pada saat itu juga data mengenai karyawan yang tidak masuk pada hari itu. Bahkan juga saat sedang berada di luar kantor, di luar kota sekalipun akan tetap bisa untuk memantau data mengenai siapa saja dan juga tentang berapa orang yang hari itu datang terlambat, dan lain sebagainya.

Dengan sistem kehadiran online tersebut

maka tidak perlu harus membuat rekap absensi manual pada saat membutuhkan data kehadiran ASN, informasinya juga sudah *realtime* jadi sangat berguna jika akan menganalisis data absensi untuk pengambilan keputusan penting dengan cepat dan segera.

5. Sudah Terintegrasi Dengan Sistem Penggajian secara Online

Salah satu keunggulan lain lagi dari absensi online berbasis android ini adalah karena juga sudah terintegrasi dan dapat menghitung gaji pegawai dengan secara otomatis juga, dan bahkan secara *realtime* pula, perlu diketahui bahwa sistem penggajian itu memang erat kaitannya dengan sistem absensi pegawai. Terkait dengan pengupahan saat pegawai melakukan lembur juga sudah dapat dihitung pula pengupahannya.

6. Praktis dan Memudahkan Bagi Pegawai

Bagi pegawai absensi online berbasis android ini juga sangat praktis dan memudahkan para pegawai yang hendak mengisi data kehadiran.

Kekurangan Absensi online berbasis android

1. Gangguan Penggunaan Aplikasi

Jika terdapat berbagai kendala dari aplikasi terkait yang sudah *terinstall* pada masing-masing *smartphone* maka akan menghambat pada proses pelaksanaan absensi *online* berbasis *android*.

2. Jaringan Menentukan Proses Absensi

Absensi *online* berbasis *android* menggunakan jaringan internet dalam pelaksanaannya, maka dari itu jika jaringan kurang stabil maka akan berpengaruh pada proses absensi

3. Bergantung pada kualitas *handphone* pegawai

Merekam kehadiran dengan aplikasi absensi *online* berbasis *android* tergantung dengan kualitas *handphone* pegawai karena jika *handphone* pegawai tidak bisa berperan dengan maksimal, karena itu memungkinkan terjadi masalah saat ingin merekam kehadiran

Implementasi absensi online dapat dikatakan berhasil apabila dalam mengimplementasikan kebijakan mempertimbangkan empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika empat faktor yang menjadi bahan pertimbangan tersebut berjalan sesuai



dengan harapan maka, absensi online berbasis android akan berjalan secara optimal dan adanya *feedback* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga, akan terciptanya ASN yang memiliki integritas sesuai dengan amanat dari Undang-Undang tersebut.

Pada pembahasan selanjutnya peneliti menentukan arah tujuan dengan berlandaskan teori dalam merealisasikan sub-sub atau kompetensi penelitian ini. Langkah selanjutnya dalam proses penelitian ini berupa pemilihan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam.

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan absensi online berbasis android terutama di Kantor BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka.

Proposisi

Dengan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan proposisi sebagai berikut: “Implementasi kebijakan absensi online berbasis android (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka)” akan berhasil jika menggunakan 4 dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (2017:2) pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data guna mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena penelitian kualitatif yang menurut peneliti paling sesuai untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka. Karena penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang-orang yang diteliti. Dilakukan dengan mengembangkan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sejauh ini apakah terdapat peningkatan kedisiplinan maupun peningkatan kinerja dengan adanya sistem tersebut. Kemudian alasan lain



peneliti menggunakan metode kualitatif adalah penelitian mengenai implementasi kebijakan absensi online ini merupakan suatu permasalahan yang harus dilihat secara menyeluruh.

Menurut Sugiyono (2017:9) yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.”

Penelitian ini pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi untuk kemudian mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka, dan kemudian menarik

kesimpulan berdasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan.

Penetapan lokasi dan waktu penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dan objek yang akan diteliti, guna menjelaskan data yang akurat atau mendekati kebenaran. Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian di Kantor BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 7 bulan dari bulan Maret sampai dengan September 2021.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak terkait yang menguasai masalah, memiliki data, serta bersedia memberikan data, disamping itu juga penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dimana hanya pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi.

Tabel Informan Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Sekretaris Badan	1
2.	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	1
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1
4.	Admin OPD	1
6.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3



Keterangan :

1. Sekretaris Badan, karena sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dengan berbagai unit kerja terkait dan mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian. Karena selaku kepala sub bidang umum dan kepegawaian tentunya mengetahui bagaimana keadaan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang berada di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, karena berturut serta dalam implementasi kebijakan absensi online berbasis android serta mengetahui berbagai konsekuensi yang akan didapat apabila tidak melaksanakan absensi online berbasis android.
4. Admin OPD, karena dianggap bahwa admin OPD mengetahui data-data kehadiran yang telah dilakukan oleh masing-masing ASN.
5. Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka, karena mereka sebagai para pelaksana implementasi kebijakan absensi online berbasis android

Sumber Data

Adapun jenis data yang peneliti peroleh dalam penelitian yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif, diantaranya :

Data Primer

Data primer yaitu dimana data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi yang ada di lapangan, yang meliputi Implementasi kebijakan absensi online berbasis android dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Adapun yang menjadi narasumber adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka, Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, Admin OPD, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan tiga orang ASN yang ada di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sebagai perwakilan.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh oleh peneliti melalui laporan-laporan, buku-buku serta catatan-catatan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan absensi online berbasis android, baik berupa struktur organisasi kepegawaian, rekapitulasi absensi online, kondisi sarana prasarana, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode



Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” (2017:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini memiliki tujuan supaya dapat menjangkau data-data yang valid pada penelitian, dimana peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan :

Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu dimana teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini peneliti akan menganalisis beberapa data berupa referensi berdasarkan buku maupun jurnal yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi acuan peneliti serta dikat-diktat perkuliahan, buku-buku, artikel, serta dokumentasi lainnya untuk dikumpulkan sebagai bahan acuan yang dijadikan sebagai landasan maupun pedoman dalam penelitian implementasi kebijakan absensi online berbasis android tersebut.

Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui penjangkauan dan peninjauan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan dengan beberapa teknik sebagai berikut :

Observasi

Menurut Nasution (1988) yang dimaksud dengan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, yaitu dimana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke Kantor BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai masalah yang diteliti.

Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara, dalam teknik pengambilan data disini, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yang dimana pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan, dan mengambil 7 orang untuk diwawancarai diantaranya, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka, Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, Admin OPD, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan tiga orang ASN yang ada di BAPPEDALITBANG Kabupaten



Majalengka sebagai perwakilan. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara tak berstruktur karena peneliti hanya mengumpulkan data

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi yang peneliti lakukan yakni pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis, ceritera yang peneliti dapatkan tentang berbagai peristiwa pada waktu yang lalu mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan atau pelaksanaan. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik atau tidak. Dalam hal ini, dapat ditekan bahwa bisa saja dalam tahap perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan *Standard Operating Procedures*

(SOPs), maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Kadji 2015:45). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Elektronik. Peraturan Presiden ini dibuat untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel yang berbasis elektronik. Sehingga, saat ini setiap instansi diharuskan menggunakan sistem pengolahan data elektronik yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tercantum di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum di Bab I Ketentuan Umum Bidang Kesatu Pengertian Pasal 1 ayat (12) yang berbunyi bahwa absensi *online* adalah aplikasi berbasis *android* yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja dan aktifitas kerja bagi pegawai di



lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat diakses secara *online* sehingga dapat menyajikan informasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menciptakan ASN yang profesional, transparan serta memiliki integritas. Maka, perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar diantaranya melalui absensi online berbasis android. Absensi online berbasis android tersebut digunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka yang mesti dilaksanakan secara profesional dan penggunaannya sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOPs) berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka BAB III Pengisian Daftar Hadir dan Pelaksanaan Apel pasal (5) ayat (1) ASN wajib mengisi daftar hadir masuk dan pulang setiap hari kerja melalui absensi online berbasis android. Pasal 6 ayat (1) Setiap orang dilarang :

- a. Mengubah, merekayasa, memanipulasi atau melakukan kecurangan terhadap database absensi online; dan
- b. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya absensi online.

Ayat (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundangundangan. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan absensi online berbasis android di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka merupakan salah satu instansi yang melaksanakan absensi online berbasis android. Untuk mengetahui implementasi kebijakan absensi online berbasis android yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDALITBANG tersebut, peneliti mengukurnya dengan 4 dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Seperti yang diungkapkan oleh George Edward III bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Berikut ini akan diuraikan hasil dari penelitian tentang implementasi kebijakan absensi online berbasis android di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka, berdasarkan empat dimensi tersebut. Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan terkait, yakni: Sekretaris Badan, Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, Admin OPD, dan



beberapa ASN yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka selaku pengguna Absensi Online Berbasis Android.

Berikut adalah ulasan mengenai Implementasi Kebijakan Absensi Online Berbasis Android di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Majalengka:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, komunikasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif jika yang bertanggung jawab dalam proses implementasinya mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan. Dalam komunikasi terdapat empat indikator yang dapat menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

a. Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik yang dapat menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik juga. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miss communication*). Menurut George Edward III implementasi kebijakan dapat berjalan secara baik dan optimal jika segala dimensi mengenai implementasi kebijakan sudah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Untuk itu melihat kelebihan dari dibuatnya absensi online berbasis android yaitu memudahkan analisa data kehadiran pegawai, artinya bahwa absensi tersebut dirancang dengan mengedepankan kemudahan bagi para penggunanya supaya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi hambatan-hambatan yang kurang dimengerti oleh para pelaksana absensi online berbasis android tersebut harus selalu segera diatasi supaya tidak menghambat di waktu yang akan datang.

Dalam hal ini transmisi (komunikasi) implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara. Hasil penelitian melalui wawancara terkait transmisi (komunikasi) apakah jika terjadi kesulitan atau ada yang kurang dipahami oleh ASN selalu dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi miskomunikasi dan sejauh mana *responsivitas depelover* dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh ASN mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka, yaitu sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:



“Jika ada ASN yang mengalami kesulitan selalu komunikasi dengan admin kepegawaian dan untuk penanganannya admin selalu respon dengan cepat sehingga permasalahan mengenai transmisi absensi para ASN mengenai absensi dapat diselesaikan dengan baik, contohnya susah login, server sibuk, bukan no hp yang bersangkutan, setelah dikomunikasikan dengan admin maka selanjutnya akan dikonsultasikan kepada pihak *developer*, dan untuk server mengenai absensi online berbasis android juga kini berada di KOMINFO”.

(13 September 2021)

Sedangkan Menurut Pendapat Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian melalui wawancara menyampaikan, bahwa:

“Iya, untuk setiap hambatan transmisi selalu dikomunikasikan karena, jika tidak segera diatasi maka akan terus seperti itu, jadi setiap ada permasalahan yang dihadapi oleh para ASN mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android disini selalu dikomunikasikan terlebih dahulu pada admin OPD yang kemudian ketika admin OPD tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh ASN yang bersangkutan maka admin OPD

lagi mengkomunikasikan kepada BKPSDM, dan untuk respon dari *developer* dalam menangani keluhan itu sangat baik”.

(13 September 2021)

Menurut admin OPD sependapat dengan Sekretaris BAPPEDALITBANG dan Kepala Sub Bidang umum dan Kepegawaian, melalui hasil wawancara menyampaikan bahwa:

“Setiap ASN selalu mengkomunikasikan kepada saya selaku admin disini, mengenai hambatan-hambatan yang mereka rasakan, kemudian saya mencoba untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang ada supaya implementasi kebijakan absensi online berbasis android ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan karena yang saya tahu permasalahan yang dirasakan disini selama diberlakukannya absensi online berbasis android itu diantaranya tidak bisa login, server sibuk, dan bukan nomor *handphone* yang bersangkutan. Namun jika saya tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada baru saya meminta bantuan kepada *developer*, dan hingga sejauh ini *developer* selalu responsif terhadap bagaimana cara penyelesaian segala permasalahan yang dirasakan oleh para ASN, seperti ketika ada permasalahan server sibuk



maka pihak *developer* dengan tanggap menambah kapasitas *bandwith* supaya *server* sibuk dapat teratasi dengan baik”.

(13 September 2021)

Pendapat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDALITBANG menyampaikan bahwa:

“Iya apabila terjadi permasalahan mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android selalu dikomunikasikan dengan baik melalui badan kepegawaian dalam hal ini adalah BKPSDM selaku pengembang absensi online berbasis android ini, contoh permasalahan yang terjadi disini yaitu seperti susah login, server sibuk yang diakibatkan oleh naik turunnya *bandwith*. Dan untuk responsivitas *developer* sejauh ini sudah cukup baik seperti dalam hal ini untuk mengatasi *server* sibuk yang diakibatkan oleh *bandwith* maka pihak *developer* dengan tanggap menambah kapasitas *bandwith* untuk mengatasi permasalahan tersebut karena setiap permasalahan yang terjadi harus dikomunikasikan dan segera diatasi supaya implementasi kebijakan absensi online berbasis android berjalan dengan optimal dan dapat mencapai tujuan dengan optimal”.

(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Setiap ada kesulitan atau permasalahan yang terjadi kepada kita selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diharuskan untuk melaksanakan absensi online berbasis android tentu selalu mencari tahu titik permasalahannya dan mencoba untuk mencari solusinya sendiri terlebih dahulu, apabila kita tidak mengetahui bagaimana jalan keluar dari permasalahan yang terjadi tersebut baru kita mengkomunikasikannya tetapi tidak langsung kepada admin OPD maupun kepada *developer* melainkan menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman kita yang sama-sama selaku *user* atau pelaksana absensi online berbasis android apabila masih tetap tidak bisa diatasi maka selalu dikomunikasikan kepada admin OPD yang bilamana nantinya admin OPD tersebut tidak bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi maka, selalu dikomunikasikan lagi kepada pihak *developer*. Untuk responsivitas *developer* sejauh ini sudah cukup baik dalam merespon setiap permasalahan yang terjadi.

(14 September 2021)

Menurut peneliti mengenai hasil penelitian tersebut diatas



mengenai pentingnya transmisi dalam implementasi kebijakan absensi online berbasis android untuk mengetahui tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka telah mempertimbangkan berbagai macam permasalahan, hal tersebut berdasarkan penelitian melalui wawancara terkait. Dimana dari hasil penelitian mengenai transmisi dalam implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi transmisi tersebut sehingga implementasi kebijakan absensi online berbasis android kurang berjalan secara optimal, yaitu adanya hambatan yang terjadi pada aplikasi absensi online berbasis android yang digunakan oleh masing-masing ASN yang ada di BAPPEDALITBANG itu sendiri yang diakibatkan oleh masing-masing *smartphone* yang bersangkutan karena dipengaruhi oleh RAM (*Random Access Memory*) yang merupakan bawaan dari *smartphone* yang digunakan sebagai penunjang implementasi kebijakan absensi online berbasis android. Secara teori, RAM memiliki prinsip kerja yang sama dengan memori internal (*storage*) yang biasa dipakai untuk menyimpan berbagai aplikasi, foto, video dan lain sebagainya di ponsel. Transmisi dari implementasi kebijakan absensi online berbasis android juga diakibatkan oleh naik turunnya *bandwith*, sehingga mengakibatkan *overload traffic* ketika dilakukan secara bersamaan saat melakukan absensi sehingga dengan

penuhnya lalu lintas data jaringan akan mengakibatkan *collision* maka dari itu perlu adanya peningkatan *bandwith* dan menambah jumlah *repeater*.

b. Kejelasan

Perihal pelaksanaan absensi online berbasis android tentunya memiliki arah dan tujuan ideal yang hendak dicapai, untuk merealisasikan tujuan dari diadakannya absensi online berbasis android tersebut, tentunya perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu serta konsekuensi yang akan didapat apabila tidak melakukan absensi online berbasis android diantaranya yaitu pengurangan tujangan penghasilan. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Bab IV Faktor Pengurangan TPP pasal 10 ayat (1) Faktor pengurang TPP dari kehadiran kerja Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai tidak mengikuti apel pagi atau apel sore tanpa keterangan, masing-masing dikurangi 0,5% dari prosentase untuk kehadiran kerja;
- b. Pegawai tidak masuk kerja dengan keterangan dikurangi 2% per hari dari prosentase untuk kehadiran kerja;
- c. Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan dikurangi 5% per hari dari prosentase untuk kehadiran kerja;
- d. Pegawai tidak hadir dalam agenda Kabupaten/Peringatan



Hari Besar Nasional/Peringatan Hari Besar Keagamaan sesuai Undangan/Perintah/Tugas dikurangi 1% per kegiatan dari prosentase untuk kehadiran kerja.

Dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait segala sesuatu yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan melalui sosialisasi mengenai pemahaman tentang absensi *online* berbasis *android* serta tentang apa saja konsekuensi yang akan didapat jika terlambat atau tidak melakukan absensi *online* itu dapat diterima dengan jelas dan tidak adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan pada awal launching pelaksanaan absensi *online* berbasis *android* tentu dapat dipahami secara jelas karena selain sosialisasi *door to door* juga dilakukan sosialisasi melalui video sehingga dapat dipahami secara oleh para ASN. Apabila terjadi keterlambatan absen itu otomatis tidak bisa diperbaiki oleh admin, karena absensi tersebut harus dilakukan dan wajib dilakukan oleh setiap ASN yang bersangkutan, kecuali ada permasalahan baru

bisa dibantu oleh admin seperti halnya terjadi *error*, kesalahan dalam mengabsen maka dari itu admin berkewajiban membantu ASN yang bersangkutan dan kebijakan sekarang itu hanya boleh dilaksanakan 3 kali input oleh admin apabila ada *error* dari hp ASN yang bersangkutan. Untuk konsekuensi mengenai keterlambatan itu sendiri tentu akan berpengaruh terhadap Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang didapat”.

(13 September 2021)

Sedangkan Menurut Pendapat Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian melalui wawancara menyampaikan, bahwa:

“Terkait implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* sudah disampaikan dengan jelas pada saat launching absensi *online* berbasis *android* itu sendiri, mengenai kejelasan tentang absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG sudah dapat diterima dengan jelas. Namun, masih ada beberapa ASN yang sudah memahami tentang implementasi absensi tersebut serta dengan segala konsekuensinya tetapi, belum melaksanakan absensi *online* secara tepat waktu, maka itu kembali lagi kepada masing-masing orang nya karena pola pikir, persepsi orang itu berbeda-beda. Konsekuensi yang akan didapat jika



terlambat melakukan absensi online berbasis android atau bahkan tidak melakukannya sama sekali maka, akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang didapat oleh masing-masing ASN karena adanya pemotongan”.

(13 September 2021)

Menurut admin OPD sependapat dengan Sekretaris BAPPEDALITBANG dan Kepala Sub Bidang umum dan Kepegawaian, melalui hasil wawancara menyampaikan bahwa:

”Terkait kejelasan tentang pelaksanaan absensi online berbasis android sudah dapat diterima dengan jelas oleh para ASN selaku *user*, dan mereka sudah mampu memahami, serta mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada mereka selaku ASN yaitu dengan melaksanakan absensi online berbasis android. yang dimana jika tidak melaksanakan absensi online berbasis android maka tentunya akan berakibat pada pemotongan tunjangan kinerja dan mereka juga sudah memahami konsekuensinya. Namun, dalam hal pelaksanaan absensi online apalagi yang berbasis android disini tentu tidak terlepas dari yang namanya hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan absensi online berbasis android. hambatan yang dirasakan oleh ASN yaitu diantaranya *server* sibuk,

bukan nomor hp PNS yang bersangkutan. *server* sibuk diakibatkan oleh jaringan atau *bandwith* dari *handphone* ASN yang bersangkutan sedangkan, untuk keterangan bukan no HP PNS yang bersangkutan itu biasanya disebabkan karena ganti *handphone* dan *system* merecord data PNS yang bersangkutan bukan hanya melalui nomor *handphone* tetapi juga melalui IMEI *handphone* maka, pada akhirnya ketika terjadi seperti itu harus segera memberitahukan kepada admin OPD untuk di *unlock* supaya bisa digunakan lagi seperti biasa”.

(13 September 2021)

Pendapat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Pemahaman yang disampaikan melalui sosialisasi-sosialisasi sudah dapat diterima dengan jelas oleh para ASN mengenai implementasi absensi online berbasis *android* dan juga terkait kejelasan dari segala konsekuensi yang akan diterima jika tidak melakukan absensi sudah dapat diterima dengan jelas yaitu dengan berupa adanya pemotongan Tunjangan Penghasilan (TUKIN) yang didapat apabila tidak melakukan absensi online berbasis android”.



(13 September 2021)

Menurut Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Iya kejelasan tentang implementasi kebijakan absensi online berbasis android sudah jelas dan dapat dipahami”.

(14 September 2021)

Menurut peneliti mengenai hasil penelitian tersebut diatas mengenai pentingnya kejelasan dari implementasi kebijakan absensi online berbasis android untuk mengetahui tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka itu sudah jelas karena berlandaskan aturan yang sama melalui Juknis dan Peraturan Bupati Majalengka, hal itu menjadi dasar penyampaian informasi sehingga kejelasannya dapat diterima dengan baik dan tidak membingungkan dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh para implementor. Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian terkait kejelasan implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan absensi *online* berbasis *android* diantaranya, yaitu kemampuan dari beberapa ASN untuk menangkap pemahaman tentang kejelasan dari implementasi kebijakan absensi online berbasis android. Dimana masih terdapat beberapa ASN yang belum melakukan absensi secara tepat waktu karena kurangnya kejelasan yang diterima atau dipahami

oleh beberapa ASN apalagi pada ASN yang sudah tidak lagi muda, dan sebentar lagi akan pensiun, maka dari itu supaya implementasi kebijakan absensi online berbasis android tersebut berjalan secara optimal perlu adanya arahan dan bimbingan dari hati ke hati secara perlahan supaya mereka memahami betapa pentingnya absensi online berbasis android, beserta apa saja konsekuensinya apabila tidak melakukan absensi online berbasis android karena mereka juga akan dirugikan jika tidak melakukan absensi, yaitu dengan adanya pemotongan Tunjangan Kinerja (TUKIN). Maka dari itu, kita harus memberikan arahan dan penjelasan kepada mereka namun harus secara lemah lembut serta tidak menyakiti perasaan mereka sebab biasanya diusia yang sudah tidak lagi muda itu akan lebih sensitif.

c. Konsisten

Dalam implementasi kebijakan absensi online berbasis android mengenai ketetapan dan kemantapan baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dari aplikasi absensi online yang digunakan tentu sangat diperhatikan supaya apa yang diharapkan dari absensi online itu dapat dicapai dengan baik, dan dapat meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka BAB III Pengisian Daftar Hadir dan Pelaksanaan Apel Pasal 7 ayat (1) setiap ASN wajib mengikuti apel kerja



dan kegiatan upacara hari besar Nasional atau yang ditetapkan oleh Pemerintah. ayat (2) Apel Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Apel Gabungan; b. Apel Pagi; c. Apel Kesadaran Nasional.

Ayat (3) Apel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pukul 07.30 WIB. Untuk konsistensi yang dimiliki baik oleh *user* selaku pelaksana absensi *online* maupun oleh sistem aplikasi absensi *online* itu sendiri di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait sejauhmana pelaksanaan absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG dan apakah konsisten dengan peraturan jam kerja dan hari kerja yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Pemahaman para ASN di BAPPEDALITBANG saya meyakini sudah semuanya bisa menggunakan, karena itu merupakan dampak dari pembinaan sosialisasi pada saat *launching* absensi *online* di semua ASN, apabila sudah mempunyai hp *android* dan karena cara pemakaian absensi *online* sangat mudah dan simpel jadi semua ASN tidak kesulitan dalam menggunakan

absensi *online* baik pada saat masuk, pulang dan absensi kegiatan. Sehingga para ASN konsisten untuk melaksanakan absensi *online* begitupun dengan data yang dihasilkan juga bersifat konsisten dan *realtime*”.

(13 September 2021)

Sedangkan Menurut Pendapat Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian melalui wawancara menyampaikan, bahwa:

“Implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG ini sudah konsisten, dimana para Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari melakukan absensi sesuai dengan jam kerja dan hari kerja yang berlaku. Namun dengan begitu data yang dihasilkan oleh absensi online berbasis android bisa konsisten sesuai dengan peraturan jam kerja ataupun tidak karena pelaksanaan absensi online berbasis android untuk absen pagi itu dimulai dari pukul 06.30-07.30 WIB tetapi, masih ada beberapa ASN yang belum melaksanakan absensi dengan tepat waktu”.

(13 September 2021)

Menurut admin OPD sependapat dengan Sekretaris BAPPEDALITBANG dan Kepala Sub Bidang umum dan Kepegawaian, melalui hasil wawancara menyampaikan bahwa:



“Pelaksanaan Absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sudah berjalan dengan konsisten dan tepat waktu, yang dimana jika tidak melakukan absensi maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dari masing-masing ASN yang bersangkutan”.

(13 September 2021)

Pendapat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDALITBANG menyampaikan bahwa:

“Menurut saya implementasi kebijakan absensi online berbasis android itu konsisten, karena absensi online berbasis android itu harus dilaksanakan oleh seluruh ASN, untuk melihat kehadiran dari ASN, digunakan untuk meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan dalam hal untuk memanipulasi data kehadiran tetapi, tidak menutup kemungkinan masih ada sebidang orang yang memanipulasi data absensinya seperti halnya ketika terjadi *error* saat melakukan absensi tetapi ASN tersebut sudah datang secara tepat waktu namun karena ada permasalahan tersebut maka mengharuskan adanya perbaikan data, maka data tersebut tidak konsisten atau bisa diubah, data bisa diubah maksimal 3 kali dalam satu

bulan dan itupun apabila terjadi *error* saja, jadi dapat dikatakan konsisten dan dapat pula dikatakan tidak konsisten bagi sebagian orang, karena ada ASN yang konsisten melaksanakan absensi sesuai dengan aturan dan tepat waktu, tetapi ada pula beberapa ASN yang melaksanakan absensi tidak konsisten sesuai dengan aturan”.

(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Implementasi kebijakan absensi online berbasis android bisa konsisten, bisa juga tidak karena ada beberapa ASN yang belum bisa taat mengikuti aturan, dan semuanya tergantung pada individunya masing-masing. Sedangkan untuk aplikasi absensi online berbasis android dan instansinya itu konstan”.

(14 September 2021)

Menurut peneliti berdasarkan hasil dari penelitian dengan mengacu pada indikator konsisten yang dikemukakan oleh George Edward III mengenai implementasi kebijakan dalam hal ini peneliti membahas tentang implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi indikator tersebut diantaranya, yaitu kemampuan dan tanggungjawab para pelaksana kebijakan untuk konsisten dalam



melaksanakan absensi online berbasis android. Karena, meskipun dari sistem tersebut sudah bersifat *realtime* dan konsisten setiap harinya serta adanya akumulasi kehadiran pada para ASN. Diantaranya ada beberapa ASN yang tidak konsisten dalam melaksanakan absensi online berbasis android dan tidak hadir secara tepat waktu maka implementasi kebijakan absensi online berbasis android tidak akan berjalan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya permasalahan seperti itu perlu adanya peningkatan pengawasan baik itu dari Kepala Badan, Sekretaris Badan, serta Kepala Bidang selaku pimpinan supaya implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan konsisten baik itu dalam hal sistem serta ASNnya selaku *user*.

d. Akurat

Menurut George Edward III menyampaikan bahwa implementasi kebijakan perlu memperhatikan keakuratan dari kebijakan yang dibuat, dimana setiap pelaksanaan suatu kebijakan tentu akan mempertimbangkan keakuratan dari setiap kebijakan tersebut. Seperti halnya implementasi kebijakan absensi online berbasis android, bahwa setiap informasi mengenai kehadiran pegawai harus benar-benar berdasarkan bukti dan fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun

2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Bab IV Faktor Pengurangan TPP Pasal 10 ayat (4) apabila tidak memenuhi ketentuan jam kerja yaitu datang dan atau pulang cepat dihitung kumulatif per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari dalam tahun berjalan. Untuk keakuratan implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait bagaimana keakuratan dari absensi *online* berbasis *android* adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan absensi *online* di BAPPEDALITBANG itu sangat berjalan dengan baik dan akurat. Karena, setiap apel pagi yang melalui sambutan pembina apel itu selalu disorotkan dan ditekankan bahwa para ASN wajib hadir sesuai jam kerja sebelum 07.30 dan langsung melaksanakan apel pagi. Sehingga pelaksanaan absensi online berbasis android ini baik absen datang maupun pulang kerja sangat berjalan dengan baik dan konsisten setiap hari kerja. Untuk tingkat keakuratan dari



absensi online berbasis android sangat tepat dan saya meyakini 100% akurat, karena basis datanya berdasarkan *android* dan *realtime* dan tidak bisa dilakukan oleh hp yang bukan ASN yang bersangkutan serta tidak bisa juga satu ASN mempunyai dua akun diabsensi *online* jadi sangat akurat”.

(13 September 2021)

Sedangkan Menurut Pendapat Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian melalui wawancara menyampaikan, bahwa:

“Pelaksanaan absensi *online* sangat akurat karena, ketika para ASN hendak melakukan absensi sebagai bentuk pemberitahuan tentang kehadiran mereka pada instansi dimana mereka bekerja meskipun absensi *online* tetapi, para ASN diharuskan berada pada titik koordinat yang telah ditentukan pada masing-masing *smartphone* yang digunakan, apabila tidak berada pada radius yang sesuai dengan titik koordinat yang telah ditetapkan pada *smartphone* yang digunakan maka, Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tidak akan dapat melakukan absensi”.

(13 September 2021)

Menurut admin OPD sependapat dengan Sekretaris BAPPEDALITBANG dan Kepala Sub Bidang umum dan Kepegawaian, melalui hasil wawan-cara menyampaikan bahwa:

“Menurut saya absensi online berbasis android sudah akurat, data yang dihasilkan sudah akurat karena, titik koordinat dan radius untuk melakukan absensi online tersebut sudah ditentukan, *disetting* di masing-masing *handphone* ASN yang bersangkutan untuk radiusnya yaitu hanya disekitar Kantor Badan Perencanaan Pem-bangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabu-paten Majalengka, dan tidak bisa melakukan absensi diluar Kantor maka saya rasa implementasi kebijakan absensi online berbasis android sudah akurat”.

(13 September 2021)

Pendapat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDALITBANG menyam-paikan bahwa:

“Absensi *online* berbasis android bersifat akurat, mengapa saya menyebutkan akurat karena ketika akan melaksanakan absensi meskipun bersifat *online* tetapi absensi tersebut hanya dapat dilakukan di area kantor BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka karena pada aplikasi absensi online berbasis android ini sudah *disetting* titik koordinatnya pada *hand-phone* masing-masing pengguna sesuai dengan tempat kerja ASN tersebut dimana titik koordinat itu berguna untuk menentukan



radius supaya kita dapat melakukan absensi”.

(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Absensi online berbasis android sangat akurat karena bersifat *realtime* sesuai dengan posisi kita, karena ASN tidak bisa melakukan absensi diluar instansi tempat mereka bekerja”.

(14 September 2021)

Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* mengenai indikator keakuratan, bahwa implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka ini sudah berjalan dengan akurat sesuai dengan titik koordinat dan ketentuan radius yang telah ditentukan serta *disetting* pada masing-masing *smartphone* ASN atau perintah yang telah ditetapkan dimana titik koordinat absensi di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka ini berada dilapangan upacara dan apabila ada kendala teknis dan non-teknis hal itu menjadi bahan evaluasi agar implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* ini dapat berjalan lebih baik kedepannya.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang kedua dal proses implementasi kebijakan, sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia

maupun sumber daya finansial. Terdapat empat indikator yang dapat dijadikan acuan dalam melihat keberhasilan variabel sumber daya tersebut, yaitu:

a. Staf / kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut George Edward III dalam implementasi kebijakan menyampaikan bahwa staf / kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam pencapaian suatu tujuan kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya yang menjadi arah dan tujuan dari kebijakan tersebut dibuat. Pada penelitian ini menyampaikan bahwa staf / kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait bagaimana pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BAPPEDALITBANG tentang absensi *online* berbasis *android* adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Menurut saya selaku sekretaris BAPPEDALITBANG mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) disini bahwa SDM disini sudah mumpuni dalam hal implementasi kebijakan absensi online berbasis android, pemahaman ASN



mengenai absensi online berbasis android juga sudah baik dan sudah memahami bagaimana konsekuensinya jika tidak melakukan absensi online berbasis android, serta apabila dilihat dari cara pemakaian absensi online berbasis android itu sangat mudah maka akan mudah dimengerti oleh para ASN, sehingga saya rasa SDM di BAPPEDALITBANG ini sudah baik”.

(13 September 2021)

Menurut Pendapat Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian melalui wawancara menyampaikan, bahwa:

“Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG dimana para ASN sudah bisa menerima, memahami dan mengikuti absensi online berbasis android karena *fiturnya* mudah dipahami, untuk saat ini hanya berapa persen (%) yang belum begitu paham mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android yang disebabkan karena usia, tetapi terus dibimbing dan diberi pemahaman supaya lebih baik lagi dan tujuan dari implementasi kebijakan absensi online berbasis android dapat tercapai sesuai dengan rencana”.

(13 September 2021)

Menurut admin OPD sependapat dengan Sekretaris BAPPEDALITBANG dan Kepala Sub Bidang umum dan Kepegawaian, melalui hasil wawancara menyampaikan bahwa:

“Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BAPPEDALITBANG

Kabupaten Majalengka sudah memahami dan mengikuti absensi online berbasis android dengan baik karena sudah memiliki kemampuan untuk mengikuti pelaksanaan absensi online”.

(13 September 2021)

Pendapat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Menurut saya 99% Sumber Daya Manusia (ASN) sudah mumpuni dan memahami tentang implementasi absensi *online* dengan baik, serta dengan segala konsekuensi yang akan didapatkan jika mereka tidak melakukan absensi online berbasis android. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam artian disini adalah ASN yang belum begitu memahami tentang Implementasi kebijakan absensi online berbasis android itu disebabkan karena adanya latar belakang pendidikan dan ada



juga yang disebabkan karena faktor usia”.

(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG

Kabupaten Majalengka bahwa pemahaman SDM sudah 80% baik, hanya saja ada beberapa ASN sebagai SDM sebagai *user* yang kesadarannya belum maksimal”.

(14 September 2021)

Sedangkan menurut peneliti berdasarkan penelitian mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android terkait staf / kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka mempunyai tanggapan yang beragam. Permasalahan mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka diantaranya, yaitu kurangnya kesadaran dari beberapa ASN untuk melaksanakan absensi online berbasis android secara tepat waktu serta tingkat pendidikan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pelaksana absensi online berbasis android. Maka dari itu, mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dan merubah *mindset* para Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya bisa mengikuti perkembangan zaman.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka harus mempunyai sifat netral dan informasi mengenai pelaksanaan absensi online berbasis android ini tidak membeda-bedakan, berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka BAB V Ketentuan Sanksi pasal 10 ayat (1) ASN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ayat (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana pada ayat (1), ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja lainnya. serta mempunyai respon yang cepat dan tanggap, dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait sejauh mana informasi yang diberikan mengenai cara pelaksanaan kebijakan absensi *online* berbasis *android* adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Informasi terkait pelaksanaan absensi *online* ini tahap awal



dilakukan sosialisasi *online* dari BKPSDM melalui *door to door* kepada setiap perangkat daerah dan melalui tayangan presentasi, contoh pemakaian aplikasi yang terdapat didalam fitur absensi *online* sehingga para ASN itu dapat dengan mudah mempelajari video tutorial yang sudah disiapkan oleh BKPSDM”.

(13 September 2021)

Menurut Pendapat Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian melalui wawancara menyampaikan, bahwa:

“Informasi mengenai pelaksanaan absensi online selalu tersampaikan dengan baik kepada seluruh ASN sebagai *user*, dan jika ada apapun itu informasi yang berkaitan dengan absensi online selalu disampaikan seperti halnya harus segera memperbaharui aplikasi ataupun dibutuhkan data apa yang berhubungan akan kemajuan implementasi kebijakan absensi online berbasis android selalu diinformasikan”.

(13 September 2021)

Menurut admin OPD sependapat dengan Sekretaris BAPPEDALITBANG dan Kepala Sub Bidang umum dan Kepegawaian, melalui hasil wawancara menyampaikan bahwa:

“Informasi terkait pelaksanaan absensi online berbasis android sudah dijelaskan dan

diinformasikan kepada para Aparatur Sipil Negara yang ada di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka seperti ketika ada informasi mengenai *upgrad* absensi online berbasis android maka langsung dikomunikasikan,

diinformasikan supaya dapat dipahami dengan baik dan unuk pelaksanaan absensi online berbasis android juga sangat *simple* jadi tinggal di klik-klik saja mengikuti anjuran”.

(13 September 2021)

Sependapat dengan sekretaris BAPPEDALITBANG Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDALITBANG dalam wawancaranya menyampaikan bahwa”

“Informasi mengenai absensi online berbasis android sudah disampaikan melalui sosialisasi pada saat *launching* absensi *online* baik saat *door to door* kepada setiap perangkat daerah melalui tayangan presentasi, informasi yang disampaikan mengenai absensi online berbasis android sudah jelas, disana dijelaskan bahwa para ASN diharuskan untuk melaksanakan absensi online berbasis android agar ASN tersebut selanjutnya bisa melakukan pengisian SKP (Sasaran Kerja Pegawai), dan segala konsekuensinya pun diinformasikan secara jelas kepada setiap ASN selaku *user*



yang bilamana ketika mereka tidak melakukan absensi online berbasis android selama tiga hari maka tidak akan bisa melakukan pengisian SKP”.

(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Informasi cukup baik, cukup dipahami hanya permasalahan lainnya masih ada beberapa ASN yang belum disiplin”.

(14 September 2021)

Menurut peneliti berdasarkan dari hasil penelitian mengenai informasi di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka terkait implementasi kebijakan absensi online berbasis android, semuanya informasi baik dari BKPSDM tentang pelaksanaan absensi *online* berbasis *android*, informasi tentang *update* data maupun mengenai konsekuensi yang akan didapat jika tidak melaksanakan absensi itu sudah diinformasikan secara jelas dan terperinci kepada seluruh ASN di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka. Namun dengan begitu terkait indikator informasi pada kenyataan yang ada dilapangan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat diantaranya, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan setiap informasi yang disampaikan mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android. Maksudnya disini, bahwa segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan absensi *online* sudah diinformasikan kepada seluruh ASN selaku pengguna (*user*) namun segala

sesuatu yang telah diinformasikan maka kembali lagi pada kemampuan ASN untuk memahami dan mengimplementasikan apa yang telah diinformasikan apakah dapat diterima dengan baik dan optimal atau tidak karena, apabila setiap informasi telah dikemukakan secara jelas dan terperinci jika tanggapan dari ASNnya kurang maka, informasi tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik, dan akan terjadi miskomunikasi jika terus dibiarkan.

c. Wewenang

Berkaitan dengan wewenang para pelaksana absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka harus berkarakeristik keras, ketat dan tegas pada aturan serta taat pada sanksi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka BAB IV Pembinaan dan Pengawasan pasal 8 ayat (1) Pembinaan dan pengawasan ketentuan jam kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dilakukan oleh Bupati. Ayat (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat Tinggi Pratama (setingkat Eselon II) atau kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait sejauh mana dalam menerapkan wewenang untuk menegur teman sejawat yang terlambat datang dalam melaksanakan



absensi *online* berbasis *android* adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Saya selaku sekretaris BAPPEDALITBANG berkewajiban, bertanggungjawab dalam membina para ASN dalam hal kepegawaian saat ini saya selalu menegur, selalu melakukan *warning* dan selalu melakukan teguran secara lisan saat melakukan apel pagi. Sehingga biasanya saya pada saat apel pagi saya selalu mengabsen para ASN yang melaksanakan apel pagi, sehingga dari sana akan diketahui pada saat ada pejabat struktural yang terlambat dan tidak melakukan absensi *online* secara tepat waktu sesuai dengan aturan biasanya saya langsung menyampaikan pada saat apel pagi sehingga, mudah-mudahan akan ada rasa malu dan tidak melakukannya lagi dikemudian hari, dan apabila ada ASN yang tetap seperti itu maka konsekuensinya yaitu pemotongan terhadap tunjangan kinerja yang didapat. Di BAPPEDALITBANGT tidak ada istilahnya yang melakukan titip absen dengan cara menggunakan 2

handphone yang berbeda, justru mereka akan merasa rugi karena setiap hari saya selalu mengawasi mereka, memantau mereka supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan, dan saya selalu mengawasi setiap ASN yang melakukan absensi yang apabila nanti saya melihat rekapitulasi akhir absennya ternyata rajin sedangkan pada kenyataannya orang tersebut jarang ada maka saya akan menegurnya dan memberikan sanksi dan pada saat ini hal tersebut tidak terjadi di BAPPEDALITBANG.

Kuncinya selalu melakukan absensi pada saat apel pagi dan selalu di pantau”.

(13 September 2021)

Menurut Pendapat Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian BAPPEDALITBANG melalui wawancara menyampaikan, bahwa:

“Saya selaku Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian selalu menanyakan terkait kehadiran dari para ASN di BAPPEDALITBANG, dan apabila ada yang bermasalah dalam melakukan absensi *online* saya selalu menanyakan apa kendalanya, lalu mencari solusi penyelesaian permasalahannya serta meluruskan supaya tidak menghambat dan para ASN lebih disiplin lagi. Kendala yang dihadapi oleh beberapa ASN biasanya yaitu berupa server sibuk yang



disebabkan oleh jaringan dan RAM dari *smartphone* yang digunakan. Maka dengan begitu saya menyarankan kepada ASN di BAPPEDALITBANG bahwa ASN harus mempunyai *smartphone* dengan RAM (*Random Access Memory*) minimal 2GB untuk menunjang absensi online berbasis android”.

(13 September 2021)

Menurut admin OPD sependapat dengan Sekretaris BAPPEDALITBANG dan Kepala Sub Bidang umum dan Kepegawaian, melalui hasil wawancara menyampaikan bahwa:

“Dalam implementasi kebijakan absensi online berbasis android saya selaku admin OPD mempunyai wewenang untuk membantu setiap ASN yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan absensi *online* seperti ketika mereka ada yang terlambat melakukan absensi tetapi mereka sudah datang secara tepat waktu namun karena ada permasalahan yang terjadi saat hendak melakukan absensi dan mengakibatkan keterlambatan, ataupun bahkan ada beberapa ASN yang melakukan absen *double* pada hari itu, melakukan absensi saat belum waktunya pulang maka saya akan membantu untuk menyelesaikannya. Serta apabila tiba-tiba di siang hari

ada keperluan mendesak belum sempat melakukan absen pulang ataupun ada yang melaksanakan Dinas Luar (DL) maka saya akan membantu mengabsenkan dengan catatan direkapitulasi absen nantinya ada keterangan oleh admin dan membantu memperbaiki maksimal sebanyak 3 kali dalam satu bulan”.

(13 September 2021)

Menurut pendapat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDALITBANG melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Setiap ada ASN yang terlambat ataupun tidak melakukan absensi online berbasis android secara tepat waktu khususnya ketika itu terjadi pada bawahan saya tentu saya mempunyai wewenang untuk mengingatkan, menegurnya secara lisan dan menanyakan apa alasannya terlambat ataupun bahkan sampai tidak melakukan absensi online berbasis android meskipun respon dari setiap orangnya berbeda-beda tergantung *mindsetnya*, karena bilamana tidak mengingatkan saya juga sebagai atasan akan dikenakan sanksi. Untuk ASN yang tidak datang secara tepat waktu dan tidak melakukan absensi juga akan dikenakan sanksi, sanksinya yaitu berupa tegurann lisan, teguran tertulis,



bahkan hingga sanksi administrasi yang dimana sanksi administrasi disini yaitu berupa skor, hingga penundaan kenaikan pangkat pada tahun berikutnya”.

(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Untuk wewenang bahwa para ASN tentu harus mengingatkan apabila ada teman sejawat yang lupa atau bahkan tidak melakukan absensi online berbasis android. tetapi untuk menegur kita tidak bisa langsung menegur karena harus sesuai dengan aturan jadi setiap bagian itu punya haknya masing-masing maka dari itu misal ada ASN dari bidang A menegur kepada ASN dibidang B itu tidak boleh tetapi seharusnya apabila ada ASN dibidang A yang lalai maka orang-orang dari bidang A juga yang mempunyai wewenang untuk menegur tidak boleh ASN dari bidang B menegur kepada ASN dibidang A begitupun sebaliknya.

(13 September 2021)

Mengenai indikator wewenang peneliti menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai wewenang di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka terkait implementasi kebijakan absensi online berbasis android cukup baik, dimana para pimpinan juga telah berkali-kali mengingatkan pada para ASN untuk

melaksanakan absensi online berbasis android, namun dengan begitu sangat disayangkan berdasarkan hasil penelitian disana bahwa memang pada dasarnya kemampuan untuk melaksanakan wewenang dilaksanakan sesuai dengan aturan secara profesional tanpa membedakan terkait implementasi kebijakan absensi online berbasis android namun di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka masih ada batasan-batasan tersendiri untuk melaksanakan wewenangnya seperti halnya ketika ada ASN dari bidang A yang tidak melakukan absensi itu misal kita dari bidang B tidak bisa menegurnya dengan leluasa begitu saja tetapi harus dari bidang A nya yang berhak menegur begitupun sebaliknya.

d. Fasilitas

Menurut George Edward III fasilitas merupakan salah satu dari indikator implementasi kebijakan, dimana fasilitas sangat berpengaruh dalam menunjang pelaksanaan kebijakan, seperti halnya disini yaitu fasilitas untuk menunjang implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka baik sarana dan prasarana yang diperlukan.

Dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait bagaimana dengan fasilitas yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan absensi *online* berbasis *android* serta sejauh mana fasilitas yang telah disediakan oleh BAPPEDALITBANG sudah memadai untuk menunjang



pelaksanaan absensi *online* berbasis *android* adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Untuk fasilitas yang karena absensi *online* ini memerlukan akses internet, maka di BAPPEDALITBANG ini sudah tersedia akses wifi di berbagai sudut BAPPEDALITBANG.

Sehingga tidak ada lagi alasan soal internet (tidak mempunyai kuota) karena ketika sampai di lingkungan BAPPEDALITBANG ini sudah disediakan fasilitas untuk menunjang implementasi absensi *online* berbasis *android*”.

(13 September 2021)

Menurut Pendapat Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian BAPPEDALITBANG melalui wawancara menyampaikan, bahwa:

“Untuk fasilitas untuk pelaksanaan absensi *online* tergantung pada pribadi masing-masing namun, supaya dapat menunjang proses implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* itu ASN harus difasilitasi dengan *smartphone android* dengan RAM minimal 2 GB, jaringan minimal 3G, dan untuk OS (Operating System) minimal 6. Sedangkan untuk

fasilitas yang telah disediakan oleh BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka seperti disediakan akses *wifi* di seluruh wilayah Kantor sudah mumpuni untuk menunjang implementasi absensi *online* tersebut, jadi tidak ada lagi alasan ASN tidak melakukan absensi karena tidak adanya akses internet”.

(13 September 2021)

Pendapat menurut admin OPD BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Fasilitas untuk menunjang absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka ini sudah memadai karena absensi *online* ini berbasis *android* dan setiap ASN sudah memiliki *smartphone android* yang dapat menunjang implementasi absensi tersebut, dengan catatan RAM dari *smartphone* tersebut harus minimal 2 GB, dan selama ini fasilitas yang digunakan oleh para ASN sudah *support* namun, bagi ASN yang menggunakan hp *advan* itu belum *support* dan harus diganti. Untuk fasilitas yang disediakan oleh BAPPEDALITBANG itu sendiri sudah mumpuni karena absensi ini *online* maka BAPPEDA sudah menyediakan akses *wifi* disetiap sudut kantor jadi, tidak ada alasan lagi tidak



melakukan absensi karena tidak mempunyai kuota”.

(13 September 2021)

Menurut pendapat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDALITBANG melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Terkait fasilitas untuk menunjang implementasi kebijakan absensi online berbasis android baik dari mulai *smartphone* hingga kuota internet sudah mumpuni pada setiap ASNnya. Dan untuk fasilitas yang telah disediakan di BAPPEDALITBANG untuk menunjang implementasi kebijakan absensi online berbasis android memang sudah cukup baik namun sebagai cadangan barangkali *wifi* yang telah disediakan sedang dalam masalah maka, kita sebagai ASN menyediakan kuota internet untuk berjaga-jaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada saat tahun 2020 BAPPEDALITBANG

Kabupaten Majalengka menggunakan *wifi icon plus* yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai media penunjang proses pemerintahan yang difasilitasi oleh sekretariat bidang umum. Sedangkan untuk tahun 2021 ini *wifi* yang digunakan di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka

menggunakan *wifi* yang berasal dari Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PDSMU) yang lebih dikenal dengan SKNet (Sindangkasih Net) untuk memajukan proses pemerintahan”.

(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing ASN dan fasilitas yang telah disediakan oleh BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sudah sangat memadai untuk pelaksanaan absensi online berbasis android”.

(14 September 2021)

Menurut pendapat peneliti berdasarkan keadaan yang ada dilapangan selama melakukan penelitian bahwa, sarana dan prasarana guna menunjang implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka cukup baik. Baik itu dilihat dari sisi instansi maupun dari sisi ASN selaku *user*. Dimana pada instansi dapat dilihat dari banyaknya akses *wifi* disetiap penjuru serta difasilitasi dengan *repeater* sedangkan, dilihat dari fasilitas yang dimiliki oleh para ASN juga sudah cukup mumpuni walaupun ada beberapa dari ASN yang ada di BAPPEDALITBANG yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang implemetasi absensi online berbasis android.



3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan, para implementor kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya. Terdapat dua indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melihat keberhasilan variabel sikap pelaksana ini, yaitu:

a. Mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Bagian Kedua Penilaian Kinerja Pegawai pasal 12 ayat (1) Setiap Pegawai wajib membuat Perjanjian Kinerja yang disahkan oleh atasan langsung. Ayat (2) Untuk mencapai target kinerja sebagaimana telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja, Pegawai wajib menyusun SKP Tahunan dan SKP Bulanan. Ayat (3) Penilaian kinerja oleh atasan langsung wajib dilakukan setiap akhir bulan berjalan melalui Si Rancage. Ayat (4) Apabila terjadi perubahan diantaranya perubahan jabatan, perubahan tugas pokok dan fungsi jabatan serta adanya perubahan kebijakan pemerintah maka Perjanjian Kinerja dapat diubah dengan persetujuan atasan langsung. Ayat (5) Perjanjian Kinerja bagi Pegawai pindahan ke Pemerintah Daerah dilakukan sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

(SPMT). Dalam hal keinginan dan kecenderungan sikap positif dalam melaksanakan implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait sejauhmana keinginan dan kecenderungan sikap positif seluruh ASN di BAPPEDALITBANG untuk melaksanakan kebijakan absensi *online* berbasis *android* dan sejauh mana peningkatan kedisiplinan ASN dengan adanya absensi *online* berbasis *android*, serta apakah seluruh ASN sudah datang tepat waktu atau baru sebagian, jika baru sebagian apa alasannya adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Untuk di BAPPEDALITBANG maupun di Majalengka pasti merasa kaget karena dari yang dahulunya melakukan absensi secara manual namun sekarang dipaksa untuk melaksanakan absensi *online* dan tidak dapat dimanipulasi, tetapi kebijakan absensi *online* ini akhirnya saya jujur saja dalam hal kedisiplinan luar biasa bagus, karena untuk tingkat kedisiplinan itu 180° berubah, kebiasaan ASN yang biasanya suka terlambat dalam hal melakukan absensi namun kini karena absensinya



menggunakan absensi *online* jadi tepat waktu. Dan untuk beberapa yang terlambat, tidak dapat dipungkiri karena memang pasti ada, namun hanya sebidang yang seperti itu karena ada beberapa keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan dan dalam satu bulan itu paling hanya ada beberapa ASN yang seperti itu, dan melihat implementasinya ASN BAPPEDALITBANG sudah cukup memahami dan terbiasa melakukan absensi *online* serta melakukan absensi *online* secara tepat waktu baik saat datang maupun pulang. Jadi dengan adanya absensi *online* berbasis *android* ini sangat membantu dalam hal kedisiplinan kehadiran”.

(13 September 2021)

Menurut Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Dengan adanya implementasi absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih disiplin dalam hal kehadiran. Untuk di implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG sudah bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya beberapa ASN yang tidak melakukan

absensi dengan tepat waktu, dan keterlambatan itu disebabkan karena adanya berbagai hambatan dan permasalahan. Contohnya seperti ada keperluan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, Dinas Luar (DL)

(13 September 2021)

Menurut pendapat admin OPD BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Tergantung dari pribadi ASNnya masing-masing ada yang rajin ada yang tidak, tetapi sejauh ini dengan adanya implementasi kebijakan absensi online berbasis android suda mengalami peningkatan kedisiplinan pegawai dalam hal kehadiran, namun ada beberapa ASN yang belum tepat waktu”.

(13 September 2021)

Menurut pendapat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDALITBANG melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Untuk ASN di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka awalnya pasti merasa kaget dengan adanya absensi *online* ini karena mereka harus beradaptasi dari yang dahulunya menggunakan absensi secara manual namun kini diharuskan untuk beralih



menggunakan absensi online berbasis android, Aparatur Sipil Negara (ASN) mau tidak mau terikat untuk melakukan absensi online berbasis android, terlebih lagi bahwa absensi online berbasis android ini sudah terpasang di *handphone* masing-masing, dengan implementasi kebijakan absensi online berbasis android mengakibatkan adanya peningkatan kedisiplinan dalam hal ini yaitu kedisiplinan waktu, karena setelah diimplementasikan absensi online berbasis android dapat dilihat bahwa ASN lebih datang tepat waktu, walaupun begitu tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa ASN yang terlambat disebabkan karena adanya urusan mendesak yang harus segera diatasi dan tidak bisa ditinggalkan”.

(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Implementasi kebijakan absensi online berbasis android sudah cukup baik karena adanya dampak terhadap TUKIN apabila tidak disiplin, dan pimpinan juga harus memberikan contoh karena, sikap bawahan tergantung dari sikap atasannya ini sendiri, dan absensi *online* di

BAPPEDALITBANG sudah cukup baik”.

(14 September 2021)

Berdasarkan penelitian tersebut mengenai mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat bahwa perlu adanya kesadaran dari diri sendiri terlebih dahulu supaya mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif serta merubah *mindset* dari ASN itu sendiri supaya mampu untuk bersikap lebih baik, serta mampu mengimplementasikan absensi online berbasis android dengan baik dan tepat waktu. Karena, sebesar apapun kita memberikan motivasi, ajakan, bahkan sanksi sekalipun jika tidak ada keinginan dan kecenderungan sikap positif dari diri ASNnya maka semuanya akan sia-sia sebab segala sesuatu harus berawal dari niat dan dari diri masing-masing ASNnya terlebih dahulu, tanpa paksaan.

b. Insentif

Dalam sebuah instansi ataupun perusahaan perlu adanya insentif sebagai kompensasi khusus yang diberikan kepada seseorang diluar gaji atau upahnya, seperti halnya dengan adanya implementasi kebijakan absensi online berbasis android perlu adanya sebuah insentif sebagai wujud kompensasi diluar gaji yang diterima oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait sejauhmana pengaruh pelaksanaan



absensi *online* berbasis *android* terhadap insentif/Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang didapat adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan absensi online berbasis *android* terhadap insentif/Tunjangan Kinerja (TUKIN) ini memang merupakan salah satu faktor untuk menilai kinerja itu dari absensi *online* dari tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran itu 40%, dan 60% dari kinerja. Maka, apabila tidak melakukan absensi online berbasis *android* itu TUKIN nya akan berkurang. Sehingga irisannya sangat erat sekali antara TUKIN dengan absensi online berbasis *android*”.

(13 September 2021)

Menurut Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka terkait insentif melalui wawancara menyatakan, bahwa:

“Insentif dari pelaksanaan absensi online berbasis *android* yaitu berupa adanya Tunjangan Kinerja (TUKIN), TUKIN dinilai dari 60% kinerja dan 40% dari absensi”.

(13 September 2021)

Menurut pendapat admin OPD BAPPEDALITBANG Kabupaten

Majalengka melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Implementasi kebijakan absensi online berbasis *android* berpengaruh pada insentif yang biasa disebut dengan Tunjangan Kinerja (TUKIN), dimana jika tidak melakukan absensi maka akan ada pemotongan tunjangan kinerja yang diketahui sebagai wujud kompensasi diluar gaji bulanan”.

(13 September 2021)

Sependapat dengan Sekretaris BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Dengan adanya implementasi kebijakan absensi online berbasis *android*, yang apabila diimplementasikan dengan baik sesuai dengan aturan maka akan mendapatkan insentif berupa Tunjangan Kinerja (TUKIN), untuk mendapatkan tunjangan kinerja tersebut maka ASN diharuskan untuk melaksanakan absensi online berbasis *android*, tunjangan kinerja dinilai dari 60% kinerja dan 40% absensi kehadiran yaitu melalui absensi online berbasis *android* tersebut. Apabila ada keterlambatan dalam hal absensi maka tentu tunjangan kinerjanya juga akan berkurang dan mengalami pemotongan. Untuk di

**BAPPEDALITBANG**

Kabupaten Majalengka ini karena implementasi kebijakan absensi online berbasis android nya sudah berjalan cukup baik maka, pemberian insentif atau yang lebih dikenal dengan tunjangan kinerja ini sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa ASN yang insentifnya dipotong karena belum melaksanakan absensi *online* secara tepat waktu dan konsisten”.

(13 September 2021)

Menurut Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Implementasi kebijakan absensi online berbasis android akan berpengaruh terhadap insentif yang berupa tunjangan kinerja apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu”.

(14 September 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka mengenai insentif bahwa jelas dengan adanya pelaksanaan absensi online ini apabila dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu maka akan mendapatkan insentif berupa tunjangan kinerja setiap bulannya, dimana nominal tunjangan kinerja tersebut berbeda-beda sesuai dengan golongannya, serta berdasarkan akumulasi kehadiran sebab jika tidak melakukan absensi

online berbasis android atau bahkan hanya sekedar terlambat melakukan absensi maka jelas akan ada pemotongan tunjangan kinerja.

4. Struktur Birokrasi

Variabel ke empat menurut George Edward III yang dikutip dalam bukunya Kadji (2015:69), yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan suatu kebijakan telah mencukupi serta para implementor kebijakan telah mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu untuk melakukannya, tetapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh yang namanya struktur birokrasi. Terdapat dua indikator yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

a. *Standard Operational Procedure (SOP)*

Dalam setiap pelaksanaan aturan tentu akan memiliki *Standard Operational Procedure (SOP)* sebagai prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para ASN atau implementor kebijakan melaksanakan kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, begitupun dengan implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android*. SOP merupakan suatu sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut. Dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait apakah implementasi absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG ini sudah sesuai



dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Absensi *online* saya rasa karena pedomannya hanya satu yaitu dari BKPSDM dan sesuai dengan SOP, begitupun karena absensi *online* itu sangat mudah untuk digunakan jadi sudah sesuai dengan SOP yang berlaku”.

(13 September 2021)

Menurut Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sudah berjalan sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang telah ditentukan”.

(13 September 2021)

Menurut admin OPD BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sudah sesuai dengan ketentuan dan SOP karena data yang dihasilkan dari absensi online berbasis android tidak dapat

dimanipulasi kecuali apabila ada kendala yang terjadi seperti *error* baru bisa diperbaiki”.

(13 September 2021)

Sependapat dengan Sekretaris BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Untuk implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG

Kabupaten Majalengka sudah sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang telah ditentukan, namun terkait toleransi mengenai merubah data sebanyak tiga kali dalam satu bulan itu sudah berdasarkan izin atau kewenangan yang tidak tertulis dari pimpinan yang didelegasikan kepada admin OPD, yang dimana kebijakan tersebut hanya boleh digunakan apabila ada ASN yang mengalami kesalahan saat absensi contohnya seperti saat *handphone error* yang akhirnya mengakibatkan dua kali melakukan absensi maka itu akan diperbaiki oleh admin, dan apabila ada ASN yang sedang melakukan Dinal Luar (DL) maka itu akan dilakukan absensi oleh admin yang nantinya pada saat rekapitulasi absensi juga akan ada keterangan (oleh admin)”.



(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Ya, untuk implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan”.

(14 September 2021)

Dari hasil penelitian mengenai *Standard Operational Prosedure* (SOP) implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sudah berjalan sesuai dengan SOP dimana para ASN harus melakukan absensi secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan titik koordinat dan radius yang telah *disetting* pada *smartphone* masing-masing. Namun jika terjadi kesalahan atau *error* itu dapat diperbaiki oleh admin dengan ketentuan bahwa dalam satu bulan hanya dapat dilakukan tiga kali perbaikan dan itupun hanya dilakukan ketika *urgent* kebijakan untuk merubah data tersebut didelegasikan oleh pimpinan kepada admin OPD dengan tidak tertulis melainkan hanya dari mulut ke mulut saja. Kebijakan tersebut dibuat untuk membantu barangkali ada ASN yang mengalami kendala seperti dia telah datang tepat waktu namun karena *handphonenya* susah melakukan absensi karena satu dan lain hal maka, itu dapat diubah sesuai dengan waktu saat mereka datang.

b. *Fragmentasi*

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya penyebaran

tanggungjawab, dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara terkait sejauhmana implementasi *Fragmentasi absensi online* berbasis *android* adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa:

“Untuk *fragmentasi absensi online* di BAPPEDALITBANG ini sudah sesuai karena apabila ada hambatan-hambatan yang dirasakan oleh para ASN disini itu selalu dikomunikasikan kepada admin OPD dan admin OPD pun selalu responsif terhadap keluhan ASN yang mengalami kesulitan, lalu apabila terjadi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh admin OPD di BAPPEDALITBANG ini admin OPD segera melaporkan kepada developer supaya dapat segera diatasi”.

(13 September 2021)

Menurut Pendapat Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian melalui wawancara menyampaikan, bahwa:

“Pelaksanaan *fragmentasi* atau penyebaran tanggungjawab mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android sudah berjalan dengan baik”.

(13 September 2021)



Admin OPD di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“*Fragmentasi* di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android sudah sesuai dan segala bentuk pengawasan dan penyebaran tanggungjawab sudah berjalan cukup optimal”.

(13 September 2021)

Menurut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“*Fragmentasi* di BAPPEDALITBANG sudah cukup baik, karena semua sudah bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing jadi untuk penyebaran tanggungjawab sudah cukup baik, para ASN sudah melaksanakan absensi online berbasis android dengan baik, meskipun ada beberapa ASN yang melakukan pelanggaran seperti terlambat datang ke kantor dan melakukan terlambat melakukan absensi, dan admin bisa membantu memperbaiki apabila terjadi *error*. Namun dengan begitu PA (Pengguna Anggaran) juga terus mengawasi kehadiran para ASN karena PA sebagai pembina kepegawaian di

perangkat daerah juga bertugas untuk melihat kedisiplinan dalam hal kedisiplinan waktu.

(13 September 2021)

Pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan hasil wawancara, bahwa:

“Penyebaran tanggungjawab mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android sudah berjalan sesuai dengan TUPOKSInya”.

(14 September 2021)

Menurut peneliti berdasarkan penelitian mengenai implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka bahwa mengenai *fragmentasi* (penyebaran tanggungjawab) sudah berjalan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, dimana para pimpinan selalu melakukan pengawasan kepada setiap ASN supaya mampu melaksanakan absensi online berbasis android secara tepat waktu serta meminimalisir adanya manipulasi data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan absensi online berbasis android di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan pernyataan menurut George Edward III (Kadji,2015) dengan 12 indikator yaitu transmisi, kejelasan, konsisten, akurat, staf / kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), informasi,



wewenang, failitas, Mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan, insentif, *Standard Operational Prosedure* (SOP), *fragmentasi*. Maka implementasi kebijakan absensi online berbasis android di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka belum tercapai sepenuhnya berjalan dengan optimal. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ternyata dalam implementasi kebijakan absensi online berbasis android di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakannya masih belum cukup baik sebab masih terlihat ada beberapa ASN yang bersikap seolah tidak peduli dengan adanya absensi *online* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menurut George Edward III itu saling berhubungan dan keterkaitan antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lainnya, antara indikator yang satu dengan indikator yang lainnya, maka dari jika ada salah satu dari indikator yang kurang baik tentu implementasinya tidak akan berjalan secara optimal.

Setiap implementasi dari suatu kebijakan tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, seperti halnya dalam implementasi absensi *online* berbasis *android* ini tentu masih memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka itu sendiri

melakukan berbagai cara atau strategi untuk mengantisipasi permasalahan yang ada. Maka dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak instansi selalu melakukan pengawasan terhadap para ASN dengan cara mengabsen para ASN saat melakukan apel pagi dan itu akan memudahkan untuk melihat siapa saja yang tidak hadir secara tepat waktu. Mengapa demikian, karena pada dasarnya saat melakukan apel pagi itu para pegawai berbaris sesuai dengan jabatannya. Selain dengan melakukan pengawasan saat apel pagi juga selalu di ceknya rekapitulasi absensi setiap satu bulan sekali dan dilihat serta disesuaikan apakah sudah sesuai atau tidak antara data rekapitulasi dengan realita yang ada dilapangan. Jika, ada kejanggalan dalam hal rekapitulasi data dengan kehadiran sehari-hari maka akan ditegur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai implementasi absensi *online* absensi *android* studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil analisis informasi pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi, setelah melakukan penelitian bahwa dalam komunikasi pada aspek transmisi implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* sudah cukup baik meskipun ternyata



masih adanya beberapa hambatan yang diakibatkan dari aplikasi absensi *online* itu sendiri, dan yang diakibatkan oleh *smartphone* masing-masing ASN ataupun dari jaringan yang mengakibatkan *overload traffic* sehingga dengan penuhnya lalu lintas data jaringan akan mengakibatkan *collision*. Kemudian terkait kejelasan sudah cukup baik karena segala aturan yang berlaku mengenai pelaksanaan absensi *online* berbasis *android* berpegang pada dasar yang sama sehingga dapat diterima dengan jelas oleh implementor kebijakan, kemudian untuk inovasi terkait sosialisasi dengan menggunakan teknik door to door ke setiap OPD ini berdampak bagus pada antusias para ASN sehingga memudahkan ASN dalam proses pelaksanaannya, namun kemampuan dan *mindset* ASN lah yang menentukan. Selain itu mengenai aspek konsisten dalam pelaksanaan absensi *online* di BAPPEDALITBANG sudah berjalan dengan cukup konsisten dan adanya peningkatan kedisiplinan pegawai dalam hal kehadiran dimana para pegawai mau tidak mau dituntut untuk melaksanakan absensi *online* berbasis *android*. Tidak hanya itu, terkait keakuratan dari absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka, tentu sangat akurat dimana titik koordinat dan radius telah ditentukan, dan *disetting*

pada *handphone* ASN yang bersangkutan sehingga mengakibatkan ASN hanya bisa melakukan absensi di wilayah instansi tempatnya bekerja sesuai dengan titik koordinat yang ditentukan serta meminimalisir adanya ASN yang hanya melakukan absensi tetapi tidak masuk kerja.

2. Sumber daya, setelah melakukan penelitian bahwa dalam implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* staf/kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) cukup baik, dimana para ASN sudah mampu memahami serta mau melaksanakan absensi *online* berbasis *android* secara tepat waktu meskipun masih terdapat beberapa ASN yang belum melaksanakan absensi *online* berbasis *android* secara tepat waktu dengan kondisi demikian maka akan berpengaruh pada implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka. Dalam implementasi suatu kebijakan perlu memperhatikan segala aspek supaya tujuan implementasi tersebut dapat tercapai, seperti halnya informasi, dalam implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten



Majalengka informasinya itu harus jelas dan terbukti kebenarannya, maka dari itu terkait informasi implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka, sudah berjalan dengan cukup baik karena setiap ada informasi yang berkaitan dengan implementasi absensi *online* berbasis *android* itu selalu disampaikan lagi kepada para ASN selaku implementor kebijakan tanpa membedakan. Disisi lain dalam implementasi kebijakan bukan hanya sekedar Sumber Daya Manusia (SDM) saja yang mesti diperhatikan tetapi juga dalam pelaksanaan wewenang yang harus berjalan sesuai dengan aturan, terkait implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka dimana pengawasan dan pelaksanaan wewenang sudah cukup baik, dimana Sekretaris Badan selalu menegur setiap ASN yang terlambat melakukan absensi atau bahkan tidak melakukan absensi sama sekali. Selain itu dalam penyediaan fasilitas untuk menunjang implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* sudah cukup baik, karena apabila proses implementasi tidak didukung oleh sarana dan prasarana maka akan menghambat

dan tidak dapat berjalan dengan optimal. Namun, terkait fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing ASN berupa *smartphone* sebagai media untuk melaksanakan absensi *online* berbasis *android* masih terdapat beberapa ASN yang belum memiliki *smartphone* yang *support* untuk implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android*.

3. Sikap pelaksana, setelah melakukan penelitian bahwa implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal apabila para pelaksana tidak mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan karena berjalan atau tidaknya suatu kebijakan tergantung dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka sudah cukup baik, karena para ASN sebagai implementor kebijakan sudah memiliki keinginan untuk melaksanakan absensi *online* berbasis *android* walaupun belum sepenuhnya tepat waktu. Untuk pemberian insentif sebagai wujud kompensasi diluar gaji yang diterimanya setiap bulan tentu perlu, untuk menambah semangat pada diri ASN yang hendak melaksanakan pekerjaan, terkait implementasi kebijakan absensi



online berbasis *android* maka akan diberikan insentif berupa Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang didapatkan setiap bulannya oleh setiap ASN yang melakukan absensi *online* berbasis *android*. Pemberian insentif atau tunjangan kinerja di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sudah berjalan dengan baik. Dimana insentif yang diberikan kepada setiap ASN itu berdasarkan akumulasi tingkat kehadiran, jadi apabila ASN tidak melakukan absensi itu akan ada pengurangan dan berpengaruh terhadap insentif yang didapat.

4. Struktur birokrasi, setelah melakukan penelitian bahwa setiap implementasi kebijakan harus sesuai dengan *Standard Operational Prosedure* (SOP) yang telah ditentukan sebelumnya. *Standard Operational Prosedure* dalam hal implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sudah baik. Karena didasari pada aturan yang sama yang tertera pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2018 dan Juknis, dan terkait penyebaran tanggungjawab (*Fragmentasi*) dalam implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka sudah baik serta adanya pengawasan yang ketat

sehingga implementasi absensi *online* tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi absensi *online* berbasis *android* studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka dengan mengacu pada teori menurut George Edward III bahwa implementasi absensi *online* berbasis *android* di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka sudah berjalan cukup baik dan mengalami peningkatan kedisiplinan pegawai dalam hal kehadiran setelah adanya insentif yaitu berupa Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan golongan, masa jabatan, serta akumulasi absensi yang dilaksanakan setiap harinya oleh masing-masing ASN di BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka selaku implementor kebijakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai implementasi kebijakan absensi *online* berbasis *android* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka diatas, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya peningkatan *bandwith* dan menambah jumlah *repeater* guna meminimalisir terjadinya *traffic overload* yang bisa mengakibatkan *collision* data, serta hendaknya sistem



- proteksi dari absensi *online* berbasis *android* lebih ditingkatkan lagi.
2. Diharapkan adanya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Serta lebih menyamakan persepsi antar ASN terkait segala informasi yang telah disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi.
 3. Diharapkan adanya arahan, motivasi dan bimbingan dari hati ke hati secara perlahan supaya dapat merubah mindset seseorang untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai TUPOKSInya dan mampu melaksanakan kebijakan absensi *online* berbasis *android* secara tepat waktu.
 4. Lebih ditingkatkan lagi pengawasan dari para pimpinan kepada Aparatur Sipil Negara terkait kedisiplinan kehadiran dalam melaksanakan absensi *online* berbasis *android* supaya lebih tepat waktu. Dan hendaknya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang selaku pimpinan memberikan motivasi, pelatihan serta pendampingan untuk merubah *mindset* ASN supaya mampu mengimplementasikan absensi *online* berbasis *android* dengan lebih konsisten dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dessy. 2005. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Artadi, Wiweko., & Irhandayaningsih, Ana. 2016. *Penerapan Absensi Elektronik Dalam Meningkatkan Disiplin Pustakawan Di Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Perpustakaan, vol.5, no.1, pp. 271-280, Jan.2016. ejournal3.undip.ac.id.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Mulyani, Yani. 2020. *Penerapan Absensi online berbasis android pada Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil pada Bidang PAI*. Jurnal Educatio FKIP UNMA, Volume 6, No.1, June 2020, pp.205-208. ISSN:2459-9522.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Safri, Anzalul. 2016. *Efektivitas Absensi Elektronik Terhadap Peningkatan Disiplin Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry)*. Penelitian. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.



- Safuan., & Rahman Deni. 2021. *Penerapan Sistem Absensi online berbasis android (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Jawa Barat)*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, Vol.3 No.1. ISSN:2655-8238.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, Bambang. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif makro dan Mikro*. Jakarta:Kencana.
- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori dan Teknik Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, A, dan Kosmajadi, E. 2014. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan (Fungsi-Fungsi Manajemen)*. Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 5. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka.
 6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
 7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Majalengka.
 8. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Dokumentasi dan Peraturan :



- Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Majalengka.
10. Buku Pedoman Penyusunan
Penelitian.
 11. Buku Profil BAPPEDALITBANG
Tahun 2021
 12. Laporan barang pengguna
semesteran (LBPS) Per-01 Januari
s.d 31 Juni 2021
 13. Buku tutorial Sistem Absensi
PNS 2018-Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Majalengka

Internet :

Pengertian android (Diakses 25 Juli
2021, Pukul 22.31 WIB)

Diakses dari

<https://bootup.ai/blog/apa-itu-android-pengertian-kelebihan/>

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 1980
(Diakses 24 Juli 2021, Pukul 22.45
WIB)

Diakses dari

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/846/kp0271980.htm/>

Pengertian absensi *online* (Diakses 25
Juli, Pukul 21.35 WIB)

Diakses dari

<https://www.kantorkita.co.id/blog/absensi-online/>